



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LaKIP)
KABUPATEN BARITO SELATAN**



TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 dapat tersusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan selama Tahun 2023, sebagai konsekuensi terhadap komitmen kinerja yang diperjanjikan untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) menuju Reformasi Birokrasi.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 – 2026.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Barito Selatan tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.

Buntok, Maret 2024



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

Dr. H. DEDDY WINARWAN, S.STP., M.Si



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi menuju *Good Governance*, kinerja merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Laporan kinerja yang diharapkan tidak hanya pemerintah kepada masyarakat tetapi juga Laporan Kinerja kepada Presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023, yang diformulasikan dari hasil kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Hal ini dikarenakan setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggung jawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holder*). Setiap Perangkat Daerah maupun pemerintah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik (*Good Governance*) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 memuat sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2023 berikut dengan target kinerja yang akan dicapai. Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. Materi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, disusun berdasarkan Prioritas Daerah dan Plafon Anggaran (PPA) APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPJMD di buat Fokus Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan, untuk masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 sebagaimana gambar 1.1 sebagai berikut :



Sumber : Tim Penyusun RPD



Berdasarkan gambar 1.1. dapat dipahami bahwa setiap tahun telah ditetapkan Tema-tema Pembangunan yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023-2026 yaitu sebagai berikut:

1.1 Tema Pembangunan pada Tahun 2023 :

“Pengembangan Ekonomi Daerah melalui optimalisasi sumberdaya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang handal”.

1.2 Tema Pembangunan pada Tahun 2024 :

“Mendorong terwujudnya iklim investasi daerah yang kondusif, disertai dgn pementapan pembangunan jaringan infrastruktur utk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”.

1.3 Tema Pembangunan pada Tahun 2025 :

“Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas”.

1.4 Tema Pembangunan pada Tahun 2026 :

“Peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan keharmonisan masyarakat, serta pengelolaan lingkungan hidup menuju Barito Selatan Dahani Dahanai Tuntung Tulus”.



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 sebagaimana yang telah diamanatkan dan berdasarkan :

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.**
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).**
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Pencapaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 yang merupakan kondisi awal dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sehingga dalam pelaksanaannya untuk pencapaian target kinerja masih memerlukan perencanaan yang matang.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

Demikian ikhtisar eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi pembangunan daerah dan negara menuju tata kelola Pemerintahah Yang Baik (Good Governance).

Buntok, Maret 2024



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

Dr. H. DEDDY WINARWAN, S.STP., M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Pelita Raya Nomor 60 Buntok Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah
Telepon (0525) 21262 Faksimile (0525) 22357

Email : inspektoratbarsel@yahoo.co.id / inspektoratdaerah.barsel@gmail.com

Website : inspektorat.baritoselatan.go.id

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Buntok, Maret 2024

Pit. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

YURISTIANTI YUDYA, S.Hut.,M.M,CGCAE

Pembina

NIP. 19731220 200801 2 010



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Kewenangan dan Tugas Pokok serta Struktur Organisasi	2
1. Aspek Politik	2
2. Aspek Manajemen Pemerintah	3
3. Kewenangan	3
4. Tugas Pokok	3
5. Struktur Organisasi	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026	8
B. Hubungan Antara Dokumen RPD	10
C. Tujuan dan Sasaran	14
D. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas	18
1. Strategi Umum	19
2. Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran	19
E. Arah Kebijakan	24
F. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	26
1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	27
2. Perjanjian Kinerja	47
3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) Kabupaten Barito Selatan	51



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	53
A.	Pencapaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Kabupaten Barito Selatan Dalam Pelaksanaan Program	54
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Ekonomi Kreatif serta Mendorong Masuknya Investasi Daerah	55
2.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	56
3.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	56
4.	Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten	57
5.	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	57
6.	Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	57
7.	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	58
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat	59
9.	Meningkatnya Kapasitas Antisipasi dan Penanganan Terhadap Bencana dan Pandemi	59
10.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	60
11.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel	60
12.	Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat	61
13.	Meningkatnya Pengembangan e-Government menuju Smart City	62
14.	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	62



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

B. Prioritas Pembangunan Tahun 2023	63
C. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	66
D. Realisasi Anggaran Tahun 2023	68
BAB IV PENUTUP	88
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	8
Gambar 1	Hubungan Antara Dokumen Perencanaan	11
Tabel 2.1.	Strategi Umum RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026	19
Tabel 2.2.	Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke Strategi	20
Gambar 2	Tema Pembangunan 2023-2026	25
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU)	30
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja	48
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Daerah	53
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Pembangunan	57
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Ekonomi Kreatif serta Mendorong Masuknya Investasi Daerah	74
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Meningkatnya Konektivitas Wilayah	74
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	74
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten	75
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	75
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	75
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	76
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat	77
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Meningkatnya Kapasitas Antisipasi dan Penanganan Terhadap Bencana dan Pandemi	77



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

Tabel 3.10	Capaian Kinerja Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	78
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel	78
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat	79
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Meningkatnya Pengembangan e-Government menuju Smart City	80
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	80
Tabel 3.15	Hubungan dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2023-2026	85
Tabel 3.16	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 dan 2023	86
Tabel 4.1	Hasil Evaluasi Atas AKIP Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 s.d. 2023	89



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel dalam pembangunan daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh Pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sampai dengan setingkat unit eselon II wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) setelah tahun anggaran berakhir, paling lambat tanggal 31 Maret.



Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

B. Kedudukan, Kewenangan dan Tugas Pokok Serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan pada aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kabupaten Barito Selatan dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Aspek Politik

Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Barito Selatan dari aspek politik ditandai dengan keberadaan dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.



Sementara itu di tingkat desa telah terbentuk dan berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di semua desa (86 desa) sebagai pelaksanaan daripada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Demikian pula peran serta anggota BPD merupakan bukti pelaksanaan otonomi daerah dari aspek politik dapat berjalan dengan baik.

2. Aspek Manajemen Pemerintah

Dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengawalinya dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah) dan manajemen pelayanan publik.

3. Kewenangan

Kewenangan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

4. Tugas Pokok

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud



masyarakat Kabupaten Barito Selatan yang madani, sejahtera lahir dan batin berlandaskan iman dan taqwa.

5. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja, sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien, dan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, maka Bupati Barito Selatan dibantu oleh :

1. Wakil Bupati,
2. Sekretaris Daerah ;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesjahteraan Rakyat;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
5. Asisten Administrasi Umum;
6. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;
7. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan ESDM;
8. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
9. Sekretariat Daerah yang terdiri 9 (sembilan) bagian :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

- 9.1. Bagian Pemerintahan;
- 9.2. Bagian Hukum;
- 9.3. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 9.4. Bagian Perekonomian dan SDA;
- 9.5. Bagian Administrasi Pembangunan;
- 9.6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 9.7. Bagian Organisasi;
- 9.8. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
- 9.9. Bagian Umum;
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas bagian :
 - a. Sekretaris;
 - b. Tenaga Ahli / Tim Ahli;
 - c. Bagian Umum;
 - d. Bagian Hukum dan Persidangan;
 - e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
11. Dinas terdiri dari :
 - 11.1 Sekretariat Daerah;
 - 11.2 Sekretariat DPRD;
 - 11.3 Inspektorat Daerah;
 - 11.4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 11.5 Dinas Kesehatan;
 - 11.6 Dinas Pendidikan;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

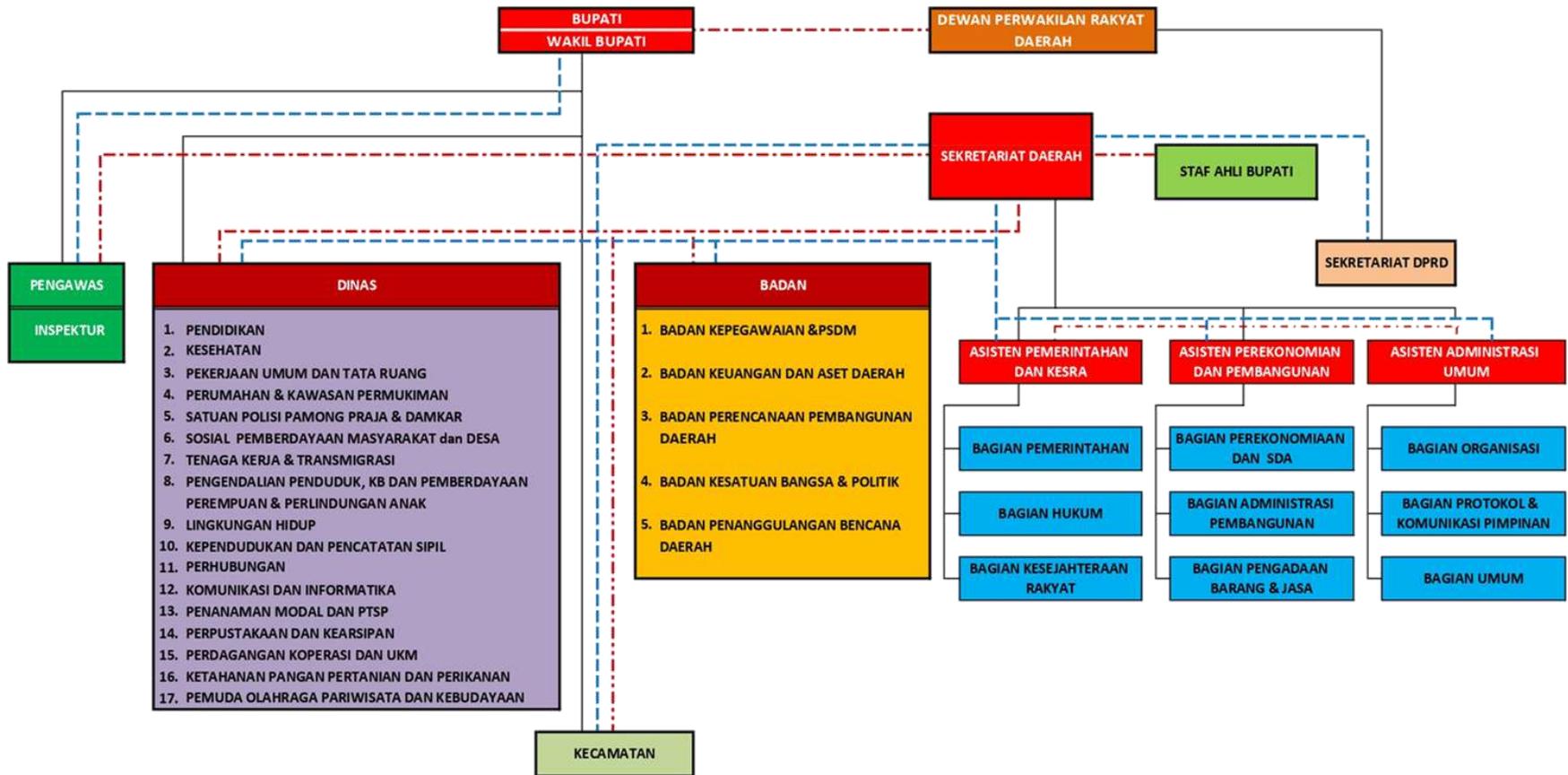
- 11.7 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 11.8 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 11.9 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 11.10 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - 11.11 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 11.12 Dinas Perhubungan;
 - 11.13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 11.14 Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
 - 11.15 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - 11.16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 11.17 Dinas Lingkungan Hidup;
 - 11.18 Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 11.19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - 11.20 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
12. Badan terdiri dari :
- 12.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 12.2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

- 12.3 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 12.4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 12.5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 13. Kecamatan ada 6 (enam) terdiri atas :
 - 13.1 Kecamatan Jenamas;
 - 13.2 Kecamatan Dusun Hilir;
 - 13.3. Kecamatan Karau Kuala;
 - 13.4 Kecamatan Dusun Selatan;
 - 13.5 Kecamatan Dusun Utara;
 - 13.6 Kecamatan Gunung Bintang Awai
- 14. Kelurahan ada 7 (tujuh) terdiri atas :
 - 14.1 Kelurahan Rantau Kujang;
 - 14.2 Kelurahan Mangkatip;
 - 14.3 Kelurahan Bangkuang;
 - 14.4 Kelurahan Buntok Kota;
 - 14.5 Kelurahan Hilir Sper;
 - 14.6 Kelurahan Jelapat;
 - 14.7 Kelurahan Pendang
- 15. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016)



CATATAN :

- GARIS KOMANDO —————
- GARIS PERTANGGUNGJAWABAN - - - - -
- GARIS KOORDINASI



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar instansi pemerintah mampu menjawab tuntutan lingkungan yang strategi baik lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyeleraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

Pelaksanaan analisis internal dan eksternal, oleh para perencana strategi dapat mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi didalam memenuhi visi dan misinya. Pertanyaan “bagaimana kita menuju kesana” dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

A. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022, mengamanatkan



agar Kabupaten / Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026. Sehubungan dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan berakhir pada Bulan Mei 2022 dan sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka sesuai peraturan perundang-undangan Bupati Barito Selatan sejak bulan Mei 2022 dijabat oleh Penjabat Bupati sampai ada Bupati Barito Selatan yang definitif.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 pada dasarnya adalah merupakan himpunan dari seluruh Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026. Oleh sebab itu, penyusunan RPD dan Renstra Perangkat Daerah sebaiknya harus disusun secara simultan atau bersamaan waktunya oleh segenap komponen Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang dijadikan tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat *Dahanai Dahanai Tuntung Tulus*, maju, mandiri, berkualitas dengan memiliki iptek dan imtaq.

Dalam rangka mencegah terjadinya kekosongan arah kebijakan pembangunan daerah bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022, dalam hal penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun RKPD, yang



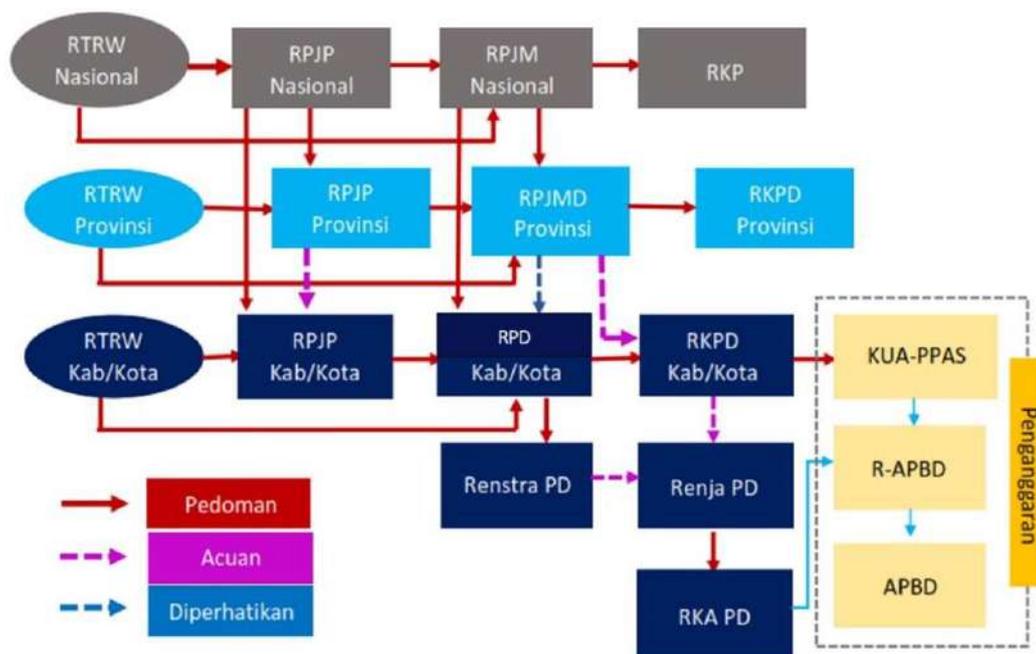
selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, yang secara implisit menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah tersebut untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.

B. Hubungan Antar Dokumen RPD

RPD memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam proses penyusunannya, RPD Kabupaten Barito Selatan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan 2006-2026, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional Tahun 2011-2031, RTRW Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2026, dan RTRW Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034, serta Rancangan Revisi RTRW Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2043. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.1
Hubungan Antar dokumen Perencanaan



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017



Berdasarkan Gambar 2.1. tersebut, hubungan masing-masing dokumen perencanaan pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyusunan RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan capaian target nasional terhadap target daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPD harus memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan.
2. RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran RPJPD Kabupaten Barito Selatan 2006-2026, serta dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
3. RPD dan Renstra PD merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Sasaran RPD termasuk program prioritas



akan dicapai melalui Renstra PD. Implementasi dari RPD Kabupaten Barito Selatan dituangkan dalam Renstra masing-masing PD sesuai tugas dan fungsinya.

4. RPD merupakan pedoman untuk menyusun RKPD dari tahun ketahun. Sasaran dan arah kebijakan RPD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program Pembangunan daerah harus dilaksanakan melalui RKPD ke RKPD tahun berikutnya. PD menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja PD.
5. RPD harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan selaras dengan rencana penataan ruang wilayah. Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang melalui pendekatan pembangunan regional dengan memperhatikan kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu serta kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.



C. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, disebutkan bahwa :

“Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, analisa pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap keempat, dan isu strategis aktual.”

Mengacu kepada hal tersebut di atas, maka periode Tahun 2023-2026 ini adalah merupakan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan 2006-2026 yang bertujuan memiliki visi untuk *mewujudkan Barito Selatanyang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertaqwa*. Olehsebab itu, rumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, dirumuskan dalam rangka untuk melakukan percepatan pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026, yang diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi



Kalimantan Tengah Tahun 2022-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan.

Secara umum telah dirumuskan sebanyak 6 (enam) tujuan pembangunan dan sebanyak 15 (lima belas) sasaran pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD)



Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 dengan uraian sebagai berikut:

- 1) **Tujuan pertama adalah** “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah”, terdiri dari 2 (dua) *sasaran pembangunan* yaitu :
 - 1.1. Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah.
 - 1.2. Meningkatnya konektivitas wilayah.
- 2) **Tujuan kedua adalah** “Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan”, terdiri dari 2 (dua) *sasaran pembangunan* yaitu:
 - 2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
 - 2.2. Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten.
- 3) **Tujuan ketiga adalah** “Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat”, terdiri dari 4 (empat) Sasaran Pembangunan yaitu:
 - 3.1. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat.



3.2. Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan

3.3. Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

3.4. Pemenuhan pelayanan dasar perumahan, air minum dan sanitasi.

4) **Tujuan keempat adalah** “Mewujudkan peningkatan ketahanan daerah terhadap resiko ancaman bencana dan budaya serta kerentanan pangan”, terdiri dari 1 (satu) *sasaran pembangunan* yaitu :

4.1. Meningkatnya kapasitas antisipasi dan penanganan terhadap bencana, pandemi dan ketahanan pangan.

5) **Tujuan kelima adalah** “Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif”, terdiri dari tiga (tiga) *sasaran pembangunan* yaitu :

5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.

5.2. Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.

5.3. Meningkatnya pengembangan e-goverment menuju smart city.



6) **Tujuan keenam adalah** “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia”, terdiri dari dua (dua) sasaran pembangunan yaitu :

6.1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keluarga dan ketenagakerjaan.

6.2. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

6.3. Meningkatkan kemajuan pembangunan kebudayaan.

D. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

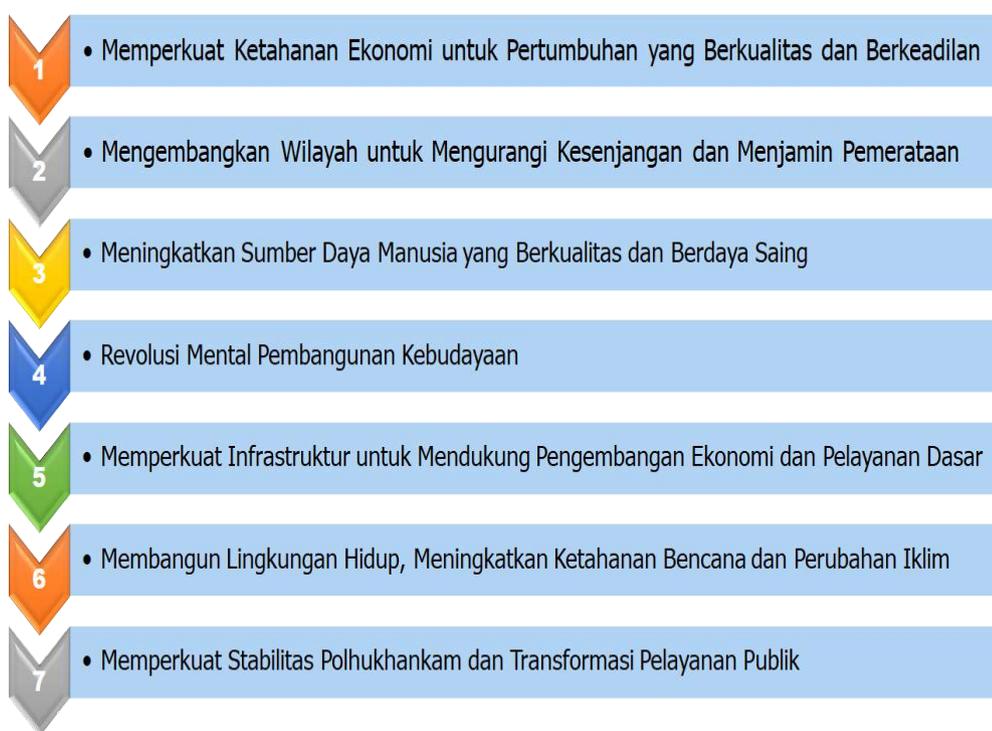
Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi Informasi.



1. Strategi Umum

Strategi umum pembangunan dalam RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.2.
Strategi Umum RPD Kab. Barsel 2023-2026



Sumber : Tim Penyusun RPD

2. Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD yang akan dicapai. Rumusan Strategi Umum selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.



Tabel 2.1.
Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke Strategi

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
1		2		3
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah	1.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas disertai dengan Penguatan Daya Saing produk industri pengolahan • Peningkatan penggunaan teknologi industri • Peningkatan produktivitas disertai dengan penguatan daya saing produk agro dan mina industri • Peningkatan penggunaan teknologi pada agro dan mina industri • Peningkatan produksi dan produktivitas pertambangan dan penggalian yang berkelanjutan • Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UMKM (melalui Reformasi Koperasi, Pengawasan dan Transformasi UMKM informasi menjadi Formal) • Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM • Pengembangan destinasi dan promosi wisata • Peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur Pariwisata • Peningkatan Akselerasi dan integrasi industri kepariwisataan • Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif • Peningkatan kenyamanan pelayanan dan efisiensi dalam perijinan berinvestasi • Peningkatan promosi dan informasi peluang investasi
		1.2	Meningkatnya konektivitas wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Infrastruktur Transportasi Darat, Laut dan Udara untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah
2.	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan	2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Kerjasama dengan semua pihak dalam Pengarustamaan Prinsip Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan • Peningkatan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup • Pengelolaan Sumber Daya Air



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

		2.2	Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pembangunan wilayah yang terintegrasi dengan dokumen RTRW
3.	Meningkatkan tingkat kondisitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat	3.1	Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Menjunjung tinggi norma, agama, budaya, dan adat istiadat lokal• Edukasi dan Pencegahan Konflik Berbasis Masyarakat.
		3.2	Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan	<ul style="list-style-type: none">• Sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antar pusat dan daerah, antar sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu• Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil dalam upaya menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan• Memperluas dan meningkatkan kualitas BUMDesa• Meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa
		3.3	Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	<ul style="list-style-type: none">• Mendukung sistem perlindungan sosial• dan jaminan sosial• Pengembangan dan penguatan kapasitas PMKS dalam upaya penanganan PMKS
		3.4	Pemenuhan pelayanan dasar perumahan, air minum dan sanitasi	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum• Pembangunan infrastruktur sanitasi• Pengembangan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas kawasan perdesaan dan perkotaan termasuk kawasan kumuh serta pengentasan rumah tidak layak huni
4.	Mewujudkan peningkatan ketahanan daerah terhadap resiko ancaman bencana dan budaya serta kerentanan pangan	4.1	Meningkatnya kapasitas antisipasi dan penanganan terhadap bencana, pandemi dan ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Early Warning System, kesadaran masyarakat terhadap bencana dan penguatan kelembagaan bencana dan pandemi• Peningkatan Ketahanan Daerah menghadapi Bencana dan peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

5.	Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif	5.1	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) dan pengawasan masyarakat• Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)• Peningkatan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik• Evaluasi Produk-Produk Regulasi daerah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan merugikan kepentingan umum serta tidak menghargai kebinekaan.• Fokus pencapaian indikator SPM bagi PD yang memiliki SPM.
		5.2	Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah• Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date melalui Pelayanan Informasi.• Peningkatan penanganan Complaint Handling System.• Inovasi Pelayanan Publik Berbasis TIK Untuk mewujudkan pelayanan yang Cepat, Efektif, Efisien, Responsif, Transparan, dan Akuntabel
		5.3	Meningkatnya pengembangan e-government menuju smart city	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya pengembangan e-government menuju smart city



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

6.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	6.1	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keluarga dan ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan status kesehatan keluarga• Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan• Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak dan balita• Penyediaan pelayanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas• Perluasan akses dan Penguatan Fasilitas Kesehatan• Pemenuhan dan redistribusi tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil dan tertinggal.• Peningkatan RSUD Rujukan• Peningkatan akses terhadap pendidikan dasar• Peningkatan kualitas, profesionalisme, kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan• Peningkatan kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan• Peningkatan mutu teknologi informasi dan komunikasi pendidikan• Peningkatan rata-rata lama sekolah• Peningkatan kualitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja• Peningkatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja• Mengembangkan kapasitas BLK yang intensif
		6.2	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none">• Pengarusutamaan gender• Peningkatan kualitas hidup perempuan
		6.3	Meningkatkan kemajuan pembangunan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none">• Revitalisasi nilai-nilai seni dan budaya lokal.



E. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu pelaksanaan RPD. Arah kebijakan RPD merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan guna mencapai sasaran RPD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran dalam RPD.

Di samping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten termasuk PD yang terlibat di dalamnya.

Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPD di buat Fokus Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan, untuk masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Tahun 2023 sampai Tahun 2026 sebagai berikut :



Berdasarkan gambar di atas, dapat dipahami bahwa setiap tahun telah ditetapkan Tema-tema Pembangunan yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023-2026 yaitu sebagai berikut :



- 1.1 Tema Pembangunan pada Tahun 2023 :
“Pengembangan Ekonomi Daerah melalui optimalisasi sumberdaya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang handal”.
- 1.2 Tema Pembangunan pada Tahun 2024 :
“Mendorong terwujudnya iklim investasi daerah yang kondusif, disertai dengan pemantapan pembangunan jaringan infrastruktur utk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”.
- 1.3 Tema Pembangunan pada Tahun 2025 :\n
“Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas”.
- 1.4 Tema Pembangunan pada Tahun 2026 :
“Peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan keharmonisan masyarakat, serta pengelolaan lingkungan hidup menuju Barito Selatan Dahani Dahanai Tuntung Tulus”.

F. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*),



dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sementara dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan tujuan dan sasaran RPD.

Penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran



maupun potret pembangunan Kabupaten Barito Selatan di masa kini maupun yang akan datang.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Barito Selatan tahun 2023-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD). IKU diambil dari indikator tujuan RPD, sedangkan IKPD merupakan indikator sasaran dari RPD.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2023-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan



daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam hal penetapan Indikator Kinerja Utama yang berpedoman pada :

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;



2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur adalah diambil dari indikator sasaran strategi yang telah ditetapkan. Keberhasilan atau pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah dengan dukungan dari sasaran dan program yang dapat diwujudkan dan diukur untuk mencapai keberhasilan tersebut. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan penjabaran dalam RPD Tahun 2023-2026.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/308/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Bupati Barito Selatan.

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan ekonomi kreatif serta mendorong masuknya investasi daerah.	1. Tingkat Inflasi.	Tingkat Inflasi diukur dengan IHK (Indeks Harga Konsumen). Pengukuran Tingkat Inflasi Kab. Barito Selatan Mengikuti tingkat Inflasi Kota Palangka Raya, karena Palangka Raya merupakan kota IHK (Indeks Harga Konsumen) terdekat dengan Kabupaten Barito Selatan. Pada Kabupaten Barito Selatan merupakan kota IPH (Indeks Pergerakan Harga) datanya diambil dari aplikasi SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok) yang setiap hari diupdate perubahan harga 20 komoditi maksimal pukul 15.00 WIB pada hari Kerja melalui Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah.	1. BPS 2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah	1. SETDA 2. DISDAGKOP UKM 3. DKPPP
		2. PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.	PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Tahun dasar tersebut umumnya ditetapkan selama periode 10 (sepuluh) tahunan. Penentuan PDRB atas harga konstan, biasanya diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi/deflasi akibat fluktuasi harga barang.	BPS	1. DISDAGKOP UKM 2. DKPPP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			Formulasi : $\frac{\text{Target Tahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$		
		3. PDRB perkapita.	PDB per kapita dapat dikatakan sebagai ukuran output ekonomi suatu negara yang memperhitungkan jumlah penduduknya yaitu hitungan orang. Rumus tersebut membagi produk domestik bruto suatu negara yaitu PDB dengan jumlah penduduknya, singkatnya, total penduduk negara tersebut. Formulasi : $\frac{\text{Target Tahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$	BPS	1.DISDAGKOP UKM 2.DKPPP
2.	Meningkatnya konektivitas wilayah.	1. Persentase jalan dalam kondisi mantap.	Perhitungan nilai IRI dan SDI dengan mengacu pada kategori dan bentuk kerusakan jalan. Pengukuran yang dilakukan dilapangan kemudian dicari nilai rerata yang sebelumnya rute-rute yang ada dibagi ke dalam beberapa segmen. Sebelum memperoleh nilai IRI, maka dilakukan penilaian kondisi jalan menggunakan Road Condition Index (RCI) atau indeks kondisi kekasaran jalan, dimana survey dilakukan secara pengamatan atau visualisasi terhadap ruas jalan. Selain memperhatikan kondisi perkerasan, RCI juga memperhatikan kondisi dari jenis permukaannya. Setelah didapat nilai rerata maka nilai tersebut dihubungkan kedalam empat unsur yang dipergunakan.	BAPPEDA	DPUPR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			Sebagai penilaian untuk menghitung besaran nilai SDI yaitu: persentase penilaian luas retakan, penilaian lebar retakan, penilaian jumlah lubang, dan penilaian kedalaman rutting bekas roda. Perbandingan panjang jalan Kabupaten kondisi baik dengan total panjang jalan Kabupaten (SK jalan Kabupaten) x 100 %		
		2. Persentase jembatan dalam kondisi baik.	<p>Perhitungan nilai IRI dan SDI dengan mengacu pada kategori dan bentuk kerusakan jalan. Pengukuran yang dilakukan dilapangan kemudian dicari nilai rerata yang sebelumnya rute-rute yang ada dibagi ke dalam beberapa segmen. Sebelum memperoleh nilai IRI, maka dilakukan penilaian kondisi jalan menggunakan Road Condition Index (RCI) atau indeks kondisi kekasaran jalan, dimana survey dilakukan secara pengamatan atau visualisasi terhadap ruas jalan. Selain memperhatikan kondisi perkerasan, RCI juga memperhatikan kondisi dari jenis permukaannya. Setelah didapat nilai rerata maka nilai tersebut dihubungkan ke dalam empat unsur yang dipergunakan sebagai penilaian untuk menghitung besaran nilai SDI yaitu; persentase penilaian luas retakan, penilaian lebar retak, penilaian jumlah lubang, dan penilaian kedalaman rutting bekas roda. Perbandingan panjang jembatan Kabupaten kondisi baik dengan total panjang jembatan kabupaten x 100%. Formulasi :</p> $\frac{\text{panjang jembatan Kabupaten kondisi baik}}{\text{Total panjang jembatan Kabupaten}} \times 100\%$	DPUPR	DPUPR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		3. Persentase layanan angkutan darat dan Sungai.	<p>Perbandingan jumlah Angkutan Darat dibagi dengan jumlah penumpang angkutan darat x 100%</p> <p>Formulasi :</p> $\frac{\text{Jumlah Angkutan Darat}}{\text{Jumlah Penumpang Angkutan Darat}} \times 100\%$ <p>Perbandingan jumlah angkutan Sungai dibagi dengan jumlah penumpang angkutan Sungai x 100%</p> <p>Formulasi :</p> $\frac{\text{Jumlah Angkutan sungai}}{\text{Jumlah Penumpang Angkutan sungai}} \times 100\%$	DISHUB	DISHUB
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan (IKL).	<p>Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKL dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>Cara Perhitungan Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten IKL = (0.376 x IKA)+(0.405 x IKU)</p>	DLH	DLH



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
4.	Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten	Ketaatan terhadap RTRW.	Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. Perbandingan luas pemanfaatan ruang sesuai RTRWK dengan luas RTRWK X 100%. Perbandingan luas tanah yang sudah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dibagi jumlah luas wilayah dikali 100%.	BAPPEDA	1. DPUPR 2. DISPERKIMTAN
5.	Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat.	1. Persentase gangguan ketertiban umum yang ditangani.	Presentase jumlah cakupan pelayanan Trantibunlinmas, penegakan Peraturan Daerah dan koordinasi kebakaran dibagi jumlah Peraturan Daerah. Perbandingan jumlah kegiatan yang terlaksana dengan jumlah kegiatan yang direncanakan x 100% Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Kegiatan Yang Terlaksana}}{\text{Jumlah Kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$ Perbandingan jumlah gangguan ketertiban umum yang tertangani pada tahun N dengan jumlah gangguan ketertiban umum yang terdata pada tahun N X 100% Formulasi : $\frac{\text{Jumlah gangguan ketertiban umum yang tertangani Tahun N}}{\text{Jumlah gangguan ketertiban umum yang terdata Tahun N}} \times 100\%$	SELURUH KECAMATAN	1. SATPOLPP DAMKAR 2. KESBANGPOL 3. Seluruh Kecamatan



NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		2. Persentase Penegakan PERDA.	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat + 20% persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20% Persentase kampung yang mengimplementasikan Peraturan Daerah	SATPOLPP DAMKAR	1. SATPOLPP DAMKAR
6.	Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan.	1. Angka Kemiskinan Daerah.	<p>Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Jumlah Masyarakat miskin dibagi jumlah penduduk.</p> $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> α = 0 z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk. 	BPS	DINSOSPMD



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		1. Angka Kemiskinan Ekstrim.	Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial. Perhitungan jumlah dan angka miskin ekstrem dihitung oleh BPS setiap tahunnya dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Jumlah kemiskinan Ekstrim dibagi jumlah penduduk.	BPS	DINSOSPMD
		2. Indeks Desa Membangun.	IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional. Setiap indikator memiliki skor antara 0 s.d. 5; semakin tinggi skor mencerminkan tingkat keberartian. Misalnya : skor untuk indikator akses terhadap pendidikan sekolah dasar; bila Desa A memiliki akses fisik ≤ 3 Km, maka Desa A memiliki skor 5, dan Desa B memiliki akses fisik > 10 Km, maka memiliki skor 1. Ini berarti penduduk Desa A memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk Desa B. Jumlah desa berkembang dibagi dengan jumlah desa. Formulasi : Indeks Varibel= $(\sum \text{IndikatorX}) / (\text{Nilai Maksimum (X)})$	SELURUH KECAMATAN	DINSOSPMD



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
7.	Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Persentase PMKS yang Mandiri.	PMKS terdiri dari 26 item (Bayi terlantar, Anak cacat, anak yang berhadapan dengan hukum, Anak korban kekerasan, Tuna Susila, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang disabilitas, Tuna Susila, Gelandangan Pengemis, Orang dengan HIV AIDS, korban kekerasan NAFZA, Korban bencana alam, korban bencana sosial). Formulasi : Jumlah PMKS mandiri dibagi Jumlah PMKS. $\frac{\sum \text{PMKS (n-1)} - \sum \text{PMKS (n-)} }{\sum \text{PMKS}} \times 100$	DINSOSPMD	1. SETDA 2. DINSOSPMD
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dasar permukiman masyarakat.	1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum / Air Bersih.	Perbandingan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak dengan jumlah total rumah tangga diseluruh Kabupaten x 100% Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga}} \times 100\%$	1. BPS 2. DPUPR	DPUPR
		2. Rasio Rumah Layak Huni.	Perbandingan antara jumlah rumah layak huni terhadap jumlah penduduk . Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	BAPPEDA	DISPERKIMTAN



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		3. Persentase kawasan permukiman kumuh yang Tertangani.	Perbandingan luas kawasan kumuh yang tertangani di bagi luas kawasan kumuh keseluruhan di kali 100% Formulasi : $\frac{\text{Jumlah luas kawasan kumuh yang tertangani}}{\text{jumlah luas kawasan kumuh keseluruhan}} \times 100\%$	DISPERKIMTAN	1.DPUPR 2.DISPERKIMTAN
		4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi.	Perbandingan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak dengan jumlah total rumah tangga di keseluruhan Kabbupaten x 100% Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Mengakses Sanitasi}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga}} \times 100\%$	DPUPR	DPUPR
		5. Persentase Drainase dalam kondisi baik.	Perbandingan luas irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik dibagi dengan luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten x 100% Formulasi : $\frac{\text{Jumlah luas Drainase dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah luas drainase di daerah tersebut}} \times 100\%$	DPUPR	DPUPR
9.	Meningkatnya kapasitas antisipasi dan penanganan terhadap bencana dan pandemi.	Indeks Resiko Bencana.	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut : $\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vnerbilityul}}{\text{capacity}}$ Di mana hazard ⁻ (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitudo) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir,		



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		3. Persentase kawasan permukiman kumuh yang Tertangani.	Perbandingan luas kawasan kumuh yang tertangani di bagi luas kawasan kumuh keseluruhan di kali 100% Formulasi : $\frac{\text{Jumlah luas kawasan kumuh yang tertangani}}{\text{jumlah luas kawasan kumuh keseluruhan}} \times 100\%$	DISPERKIMTAN	1.DPUPR 2.DISPERKIMTAN
		4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi.	Perbandingan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak dengan jumlah total rumah tangga di keseluruhan Kabupaten x 100% Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Mengakses Sanitasi}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga}} \times 100\%$	DPUPR	DPUPR
		5. Persentase Drainase dalam kondisi baik.	Perbandingan luas irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik dibagi dengan luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten x 100% Formulasi : $\frac{\text{Jumlah luas Drainase dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah luas drainase di daerah tersebut}} \times 100\%$	DPUPR	DPUPR
9.	Meningkatnya kapasitas antisipasi dan penanganan terhadap bencana dan pandemi.	Indeks Resiko Bencana.	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut : $\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vnerbilityul}}{\text{capacity}}$ Di mana hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitudo) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir,		



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan para-meter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: 1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; 2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; 3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; 4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; 5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan 7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.	BPBD	BPBD
10.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.	Nilai PPH merupakan total jumlah dari 9 kelompok pangan di konsumsi penduduk yang beragam, bergizi dan seimbang.	DKPPP	DKPPP
11.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.	1. Opini BPK.	Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu: 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; 2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 4) efektivitas sistem pengendalian intern.	1. BPKAD 2. BPK	1. BPKAD 2. BAPPEDA



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		2. Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).	MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi.	1. KPK 2. Inspektorat Daerah	1. BPKAD 2. INSPEKTORAT DAERAH 3. BKPSDM 4. BAPPEDA 5. DPUPR 6. SETDA 7. DINSOSPMD 8. DPMPSTP
		3. Nilai SAKIP.	Nilai dari aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP; PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan laporan kinerja, perjanjian kinerja serta tata cara review terhadap laporan kinerja. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor B/693/AA.05/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Permintaan Data Dukung dan Matrik Tindak Lanjut untuk Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).	1. KEMENPANRB 2. Bagian Organisasi SETDA	SELURUH OPD
		4. Nilai LPPD.	LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan format yang	3.	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			ditetapkan oleh Menteri. Penyusunan LPPD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah daerah. Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi dan dinilai oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan.	1. KEMENDAGRI 2. Bagian Pemerintahan SETDA	SETDA
		5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.	Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Formulasi : Rasio PAD terhadap total pendapatan Daerah $\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total pendapatan Daerah}} \times 100\%$	BPKAD	BPKAD
12.	Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.	1. Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA.	Himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, didasarkan urusan dan kewenangan suatu Pemerintahan Daerah pada setiap tingkatannya.	BAPPEDA	BAPPEDA



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			<p>Skor total Inovasi Daerah :</p> $= \sum_{i=1}^{16} \text{Skor ISP} + \sum_{j=1}^n \sum_{i=17}^{36} \text{Skor SID ke } i \text{ Inovasi ke } j$ <p>Indeks Inovasi Daerah (IID):</p> $IID = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ISP = Indikator Satuan Pemda SID = Satuan Inovasi Daerah Σ = Jumlah N = Jumlah inovasi pemda I = Nomor indikator J = Nomor inovasi 		
		2.Indeks Kepuasan Masyarakat.	<p>Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{Bobot Nilai Tertimbang} = \frac{\text{jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}}$	1. DISDUKCATPIL 2. DPMPPTSP 3. Seluruh Kecamatan	1. DISDUKCAPIL 2. DPMPPTSP 3. Seluruh Kecamatan
13.	Meningkatnya Pengembangan e-government menuju smart	Indeks SPBE.	Perhitungan SPBE dilakukan pada tautan tauval spbe.go.id dengan menyampaikan bukti dan penjelasan pelaksanaan SPBE pada 47 Indikator.Hasil Evaluasi Indeks SPBE oleh Kemenpan RB dan Nilai masing -	KEMENPANRB	DISKOMINFO



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	city.		masing Domain hasil Evaluasi Mandiri indeks SPBE oleh Kemenpan RB.		
14.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat.	1.Indeks pembangunan keluarga (ibangga).	<p>Kemajuan Pembangunan keluarga dapat diukur melalui indeks Pembangunan keluarga (iBangga), yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi, yakni ; ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan. Hasil dari indeks tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan status Pembangunan keluarga melalui kategori Tangguh, berkembang atau rentan. Nilai komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu,</p> <p>(a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; (5) keharmonisan keluarga;</p> <p>(b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan keluarga; (4) akses informasi;</p> <p>(c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain (1) interaksi keluarga; (2) interaksi social.</p> <p>Formula iBangga:</p> <p>iBangga = $\frac{1}{3}$ (Indeks Ketentraman + Indeks Kemandirian + Indeks Kebahagiaan) x 100</p>	DPPKBP3A	DPPKBP3A



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		2. Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah dimasa mendatang. Angka harapan hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya. Dengan evaluasi tersebut pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat meningkatkan derajat Kesehatan bagi para penduduknya.	BPS	Dinas Kesehatan
		3. Rata – rata lama sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Formulasi: $RLS = \frac{1}{n} \sum_{i}^n x_i$ RLS = rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas x_i = lama sekolah penduduk ke-I yang berusia 25 tahun n = jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	BPS	Dinas Pendidikan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
15.	Meningkatnya pengarusutaman gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p>Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010.</p> <p>Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Kesehatan, (ii) Pendidikan, dan (iii) Ekonomi.</p> <p>Formula IPG :</p> $IPG = \frac{IMP \text{ Perempuan}}{IMP \text{ Laki-laki}}$	BPS	DPPKBP3A
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.	<p>Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan</p> $\frac{\text{Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Total benda, situs dan kawasan budaya yang dimiliki daerah}} \times 100\%$ <p>Persentase jumlah benda, situs dan kawasan cagar alam yang dilestarikan terhadap total benda.</p>	DISPOPARBUD	DISPORAPARBUD



2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target-target kinerja yang digambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja Keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan dinilai melalui pengukuran pencapaian indikator kerjanya.

Merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Salah satu upaya untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel adalah melalui penguatan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah. Dalam hal ini upaya penguatan akuntabilitas kinerja salah satu caranya dapat dilakukan dengan penyusunan dokumen perjanjian kinerja atau kontrak kinerja. Mekanisme penyusunan dan penggunaan kontrak kinerja / perjanjian kinerja ini berpedoman pada ***Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*** yang diharapkan



akan dapat menguatkan komitmen para pemimpin instansi dan unit kerjanya dalam pencapaian target-target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya.

Sebagai tindak lanjut dari **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah** serta **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**. Maka Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan ekonomi kreatif serta mendorong masuknya investasi daerah.	1. Tingkat Inflasi. 2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan. 3. PDRB per Kapita.	Persen Milyar Rupiah Juta	2-4 85,8 59,25
2.	Meningkatnya konektivitas wilayah.	1. Persentase jalan dalam kondisi mantap. 2. Persentase jembatan dalam kondisi baik. 3. Persentase layanan angkutan darat dan sungai.	Persen Persen Persen	36,60 51,25 50
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan (IKL).	Indeks	72,90



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

4.	Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten.	Ketaatan terhadap RTRW.	Persen	25
5.	Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat.	1. Persentase gangguan ketertiban umum yang ditangani 2. Persentase Penegakan PERDA	Persen Persen	85 100
6.	Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan.	1. Angka Kemiskinan Daerah 2. Angka Kemiskinan Ekstrem 3. Indeks Desa Membangun	Persen Persen Indeks	4,6 0,19 0,6722 (Berkembang)
7.	Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Persentase PMKS yang Mandiri.	Persen	80
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dasar permukiman masyarakat.	1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum / Air Bersih. 2. Rasio Rumah Layak Huni. 3. Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani. 4. Persentase Rumah Tinggal Bersantitas. 5. Persentase Drainase dalam kondisi baik.	Persen Nilai Rasio Persen Persen	51,35 01,19 1,25 65,73 35,17
9.	Meningkatnya kapasitas antisipasi dan penanganan terhadap bencana dan pandemi.	Indeks Resiko Bencana.	Angka	120,40
10.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.	Persen	92



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

11.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan 1 yang akuntabel.	1. Opini BPK. 2. Indeks Pencegahan Korupsi/ Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). 3. Nilai SAKIP. 4. Nilai LPPD. 5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.	Predikat Indeks Kriteria Kriteria Persen	WTP 80,00 B Sedang 5,00
12.	Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.	1. Indek Inovasi Daerah pada penilaian IGA. 2. Indeks Kepuasan Masyarakat.	Predikat Persen	Inovatif 80
13.	Meningkatnya Pengembangan e-government menuju smart city.	Indeks SPBE.	Indeks	2,60
14.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat.	1. Indeks pembangunan keluarga (ibangga). 2. Angka Harapan Hidup(AHH) 3. Rata – rata lama sekolah (RLS)	Indeks Tahun Tahun	33,36 67,29 8,33
15.	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	1. Indeks pembangunan keluarga (ibangga). 2. Angka Harapan Hidup(AHH) 3. Rata-rata Lama Sekolah(RLS)	Indeks Tahun Tahun	33,36 67,29 8,33
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.	Persen	23,53



3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) Kabupaten Barito Selatan

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Tujuan dan Sasaran RPD kabupaten Barito Selatan tahun 2023-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKD). IKU diambil dari indikator tujuan RPD, sedangkan IKD merupakan indikator sasaran dari RPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2023-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna



sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (early warning) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPD sebagaimana tabel-tabel dibawah ini :



Tabel 2.4. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026

No.	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2022)	TARGET TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
1	Tingkat Inflasi	2-4 Persen	2-4 Persen	2-4 Persen	2-4 Persen	2-4 Persen	2-4 Persen
2	PDRB Per Kapita	58,82 Juta	59,25 Juta	60,14 Juta	61,08 Juta	61,97 Juta	061,97 Juta
3	PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	82,8 Milyar Rupiah	85,8 Milyar Rupiah	87,8 Milyar Rupiah	89,8 Milyar Rupiah	90,8 Milyar Rupiah	70,8 Milyar Rupiah
4	Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	593 Milyar Rupiah	611 Milyar Rupiah	629 Milyar Rupiah	647 Milyar Rupiah	665 Milyar Rupiah	665 Milyar Rupiah
5	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi mantap	52,22 Persen	53,25 Persen	54,39 Persen	55,58 Persen	56,81 Persen	56,81 Persen
6	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	48,50 Persen	49,42 Persen	50,54 Persen	51,80 Persen	53,15 Persen	53,15 Persen
7	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	119 jumlah	110 jumlah	102 jumlah	92 jumlah	83 jumlah	83 jumlah
8	Persentase Layanan Angkutan Darat dan Sungai	47,00 Persen	50,00 Persen	55,00 Persen	60,00 Persen	65,00 Persen	65,00 Persen
9	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10	53,10
10	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,53	90,64	90,75	90,86	90,87	90,87
11	Indeks Kualitas Lingkungan (IKL)	73,78	74,62	75,46	76,30	77,14	77,14
12	Timbunan Sampah yang Ditangani	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

No.	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2022)	TARGET TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
13	Ketaatan Terhadap RTRW	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	99 Persen	99 Persen
14	Angka Kriminalitas yang Tertangani	5,13 Permiriad (persepuluhribu)	4,92 Permiriad (persepuluhribu)	4,81 Permiriad (persepuluhribu)	4,29 Permiriad (persepuluhribu)	3,69 Permiriad (persepuluhribu)	3,69 Permiriad (persepuluhribu)
15	Persentase gangguan keteriban umum yang ditangani	80 Persen	85 Persen	90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen
16	Capaian Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP Aktif (Persen)	75 Persen					
17	Tingkat Pengangguran	5,09 Persen	5,01 Persen	4,93 Persen	4,86 Persen	4,81 Persen	4,81 Persen
18	Persentase PMKS yang Tertangani	75,05 Persen	80,05 Persen	85,05 Persen	90,05 Persen	95,05 Persen	95,05 Persen
19	Persentase Penduduk Berakses Air Minum / Air Bersih	37,76 Persen	42,76 Persen	47,76 Persen	52,76 Persen	57,76 Persen	57,76 Persen
20	Rasio Rumah Layak Huni	19,00 Persen	19,01 Persen	19,02 Persen	19,03 Persen	19,04 Persen	19,04 Persen
21	Persentase Areal Kawasan Kumuh	0,30 Persen	0,23 Persen	0,15 Persen	0,08 Persen	0,00 Persen	0,00 Persen
22	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	83,15 Persen	87,15 Persen	91,15 Persen	94,15 Persen	96,15 Persen	96,15 Persen
23	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	64,59 Persen	66,59 Persen	68,59 Persen	70,59 Persen	72,59 Persen	72,59 Persen
24	Cakupan Pelayanan Bencana	29,41 Persen	47,06 Persen	64,71 Persen	82,35 Persen	100,00 Persen	100,00 Persen
25	Persentase Penurunan Jumlah Titik Api (Hot Spot)	100,00 Persen					



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

No.	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2022)	TARGET TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
26	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	90 Persen	92 Persen	95 Persen	97 Persen	100 Persen	100 Persen
27	Opini BPK	WTP Kriteria	WTP Kriteria	WTP Kriteria	WTP Kriteria	WTP Kriteria	WTP Kriteria
28	Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	70,23 Indeks	71,55 Indeks	72,92 Indeks	74,35 Indeks	75,18 Indeks	75,18 Indeks
29	Nilai SAKIP	CC Kriteria	B Kriteria	B Kriteria	B Kriteria	BB Kriteria	BB Kriteria
30	Nilai LPPD	Tinggi Kriteria	Sangat Tinggi Kriteria	Sangat Tinggi Kriteria	Sangat Tinggi Kriteria	Sangat Tinggi Kriteria	Sangat Tinggi Kriteria
31	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	5,75 Persen	6,00 Persen	6,50 Persen	7,00 Persen	7,50 Persen	7,50 Persen
32	Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	99 Persen	99 Persen
33	Indeks Desa Membangun	0,6522(berkembang) Indeks	0,6722(berkembang) Indeks	0,6822(berkembang) Indeks	0,6922(berkembang) Indeks	0,7082(maju) Indeks	0,7082(maju) Indeks
34	Rasio Penduduk ber-KTP	90 Persen	92 Persen	95 Persen	97 Persen	100 Persen	100 Persen
35	Jumlah Kajian Kelitbangan	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	2 Kajian	2 Kajian
36	Indeks SPBE	2,20 Indeks	2,50 Indeks	2,80 Indeks	3,00 Indeks	3,20 Indeks	3,20 Indeks
37	Rata-rata Lama Sekolah	8,95 Tahun	9,05	9,15 Tahun	9,25 Tahun	9,35 Tahun	9,35 Tahun
38	Harapan Lama Sekolah	12,66 Tahun	12,77 Tahun	12,88 Tahun	12,99 Tahun	13,11 Tahun	13,11 Tahun
39	Umur Harapan Hidup	67,19 Tahun	67,29 Tahun	67,39 Tahun	67,49 Tahun	67,59 Tahun	67,59 Tahun
40	Produktivitas Total Daerah	127,43 juta rupiah	129,34 juta rupiah	131,28 juta rupiah	133,24 juta rupiah	135,24 juta rupiah	135,24 juta rupiah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

No.	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2022)	TARGET TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
41	Persentase Wirausaha Muda	37,00 Persen	41,00 Persen	45,00 Persen	48,00 Persen	51,00 Persen	51,00 Persen
42	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	32,20 Indeks	33,36 Indeks	34,45 Indeks	35,58 Indeks	36,30 Indeks	36,30 Indeks
43	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,78 (%)	91,80 Persen (%)	91,82 Persen (%)	91,84 Persen (%)	91,86 Persen (%)	91,86 Persen (%)
44	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	8,00 Festival	10,00 Festival	12,00 Festival	14,00 Festival	16,00 Festival	16,00 Festival
45	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	22,56 Persen	23,53 Persen	25,71 Persen	27,78 Persen	27,78 Persen	27,78 Persen



Tabel 2.5. Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
I.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,3	2,50	2,70	2,9	3,1	3,10
2.	Laju Inflasi (%)	3,58	3,25	3,19	3,1	3,05	3,05
3.	PDRB per Kapita (Jutaan Rp)	42.121	47.975	51.229	54.720	58.474	58.474
4.	Indeks Gini	0,278	0,273	0,270	0,268	0,265	0,265
5.	Angka Kemiskinan (%)	5,04	4,98	4,93	4,88	4,82	4,82
6.	Indeks Pembangunan Manusia	70,54	70,94	71,34	71,74	72,14	72,14
7.	Angka Pengangguran Terbuka (%)	2,12	2,08	2,04	2,00	1,92	1,92
8.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,95	9,15	9,25	9,45	9,65	9,65
10.	Angka Harapan Lama Sekolah	12,65	12,73	12,80	12,88	12,95	12,95
11.	Angka Melek Huruf	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	10,75
12.	Umur Harapan Hidup	67,19	67,20	67,22	67,24	67,26	67,26
13.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	20,72	21,06	21,41	21,75	22,10	22,10



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
II.	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1.	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita (%)	53,55	53,88	54,22	54,56	54,89	54,89
2.	Desa Swasembada (%)	19,35	24,19	30,65	35,48	40,32	40,32
3.	Rasio Ketergantungan	43,17	43,37	43,67	43,97	44,17	44,17
III.	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR						
A.	Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar						
1.	Pendidikan						
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini	69,61	73,89	78,45	83,28	88,41	88,41
1.2.	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	98,32	98,32	98,52	98,72	99,00	99,00
1.3.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	89,52	92,52	94,52	96,52	98,52	98,52
1.4.	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,28	0,28	0,18	0,18	0,08	0,08
1.5.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,39	0,39	0,29	0,29	0,19	0,19
1.6.	Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100
1.7.	Angka Kelulusan SMP/MTs	100	100	100	100	100	100
1.8.	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	92,72	93,72	94,72	95,72	96,72	96,72
1.9.	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4	92,57	93,57	94,57	95,57	96,57	96,57



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
2.	Kesehatan						
2.1.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	93,16	95,31	97,51	99,76	100	100
2.2.	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	96,57	96,77	96,98	97,19	97,40	97,40
2.3.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	100	100	100
2.4.	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	0,19	2,19	4,19	6,19	8,19	8,19
2.5.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	57,75	59,80	61,93	64,14	66,42	66,42
2.6.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DED	100	100	100	100	100	100
2.7.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	100	100	100	100	100
2.8.	Cakupan Kunjungan Bayi	100	100	100	100	100	100
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
3.1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	373,96	374,96	375,96	376,96	377,96	377,96
3.2.	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	2035,49	2036	2036,50	2037	2037,50	2037,50
3.3.	Rumah Tangga Bersanitasi	13,38	14,38	15,38	16,38	17,38	17,38



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
3.4.	Kawasan Kumuh	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10
3.5.	RTH per Satuan Luas Wilayah	25,31	25,81	26,31	26,81	27,31	27,31
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
4.1.	Rumah Tangga Penguna Air Bersih	98,50	99,00	99,50	100,00	100,00	100,00
4.2.	Luas Lingkungan Permukiman Kumuh	0,013	0,011	0,009	0,007	0,0065	0,0065
4.3.	Rumah Layak Huni	2,245	96,84	97,91	98,67	100,00	100,00
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
5.1.	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100
5.2.	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK	75	75	75	75	75	75
5.3.	Angka Tunawisma	0,45	0,45	0,43	0,40	0,40	0,40
5.4.	Angka Prostitusi	1,25	1,25	1,20	1,20	1,15	1,15
5.5.	Persentase Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin	1,25	1,20	1,20	1,15	1,15	0,60
5.6.	Persentase Angka Kasus Perjudian	0,70	0,68	0,66	0,60	0,60	6,65
5.7.	Persentase Angka Kasus Penggunaan Narkotika dan Barang Zat Adektif	6,75	6,70	6,68	6,65	6,65	7,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
6.	Sosial						
6.1.	Persentase Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS)	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2.	Persentase Pemberdayaan Lansia Terlantar Potensial	39,00	48,00	64,00	80,00	90,00	90,00
6.3.	Persentase Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Potensial	40,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00
6.4.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	83,17	84,31	85,27	86,52	88,17	88,17
6.5.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.6.	Persentase RTLH Masyarakat Miskin yang ditangani	65,75	97,46	100,00	100,00	100,00	100,00
6.7.	Persentase Penyandang Cacat dan Trauma yang direhabilitasi	75,00	78,00	83,00	85,00	90,00	90,00
6.8.	Persentase Manula Potensial yang Mendapat Perlindungan	75,00	78,00	83,00	85,00	90,00	90,00
6.9.	Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Menerima Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
3.4.	Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Kg)	12.000	17.000	22.000	27.000	32.000	32.000
3.5.	Pengawasan Keamanan Pangan Segar (%)	66,67	77,78	77,78	88,89	88,89	88,89
4.	Pertanahan						
4.1.	Persentase Sertifikat Lahan Pemda yang Terbit	1,017	1,117	1,217	1,317	1,417	1,417
4.2.	Persentase Izin Lokasi yang Berjalan Sesuai Aturan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3.	Persentase Konflik Lahan yang Ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Lingkungan Hidup						
5.1.	Persentase Pengurangan Sampah	20,00	22,00	24,00	26,00	27,00	27,00
5.2.	Persentase Penanganan Sampah	41,28	42,44	43,62	44,84	45,13	45,13
5.3.	Indeks Kualitas Air	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10	53,10
5.4.	Indeks Kualitas Udara	90,53	90,64	90,75	90,86	90,87	90,87
5.5.	Indeks Kualitas Lingkungan (IKL)	73,78	74,62	75,46	76,30	77,14	77,14
5.6.	Timbunan Sampah yang Ditangani	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
6.1.	Cakupan Penerbitan Akte Perkawinan	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00
6.2.	Cakupan Penerbitan KTP	99,98	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00
6.3.	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	95,03	96,03	97,03	98,03	99,03	99,03



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
6.4.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.5.	Cakupan Penerbitan Akte Kematian	70,00	75,00	78,00	81,00	85,00	85,00
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
7.1.	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.2.	Persentase Perempuan yang Aktif di Desa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.3.	Persentase Desa Berkriteria Baik	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.4.	Persentase Pemerintahan Desa yang Terbina	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
8.1.	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	69,86	70,71	71,46	72,12	73,07	73,07
8.2.	Cakupan <i>unmet need</i>	15,51	14,63	13,86	13,20	12,62	12,62
8.3.	Ratio ASFR 15-19 Tahu	48,48	48,56	48,32	48,11	47,94	47,94
9.	Perhubungan						
9.1.	Persentase Angkutan Transportasi dalam Kondisi Baik	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
9.2.	Persentase Pengoperasian Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	65,46	65,92	66,38	66,84	67,30	67,30
9.3.	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Lalu Lintas	4,50	4,00	3,00	2,50	2,00	2,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
10.	Komunikasi dan Informatika						
10.1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
11.1.	Persentase Peningkatan Wirausaha Baru	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00
11.2.	Persentase UMKM Yang Dilakukan Pembinaan Berupa Dana Yang Diakses dari Perbankan, Tingkat Penjualan, Kualitas SDM, Sistem Administrasi dan Keuangan, Jumlah Pelanggan yang dilayani	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	9,00
12.	Penanaman Modal						
12.1	Kontribusi Investasi Bidang Pariwisata terhadap Investasi Daerah	24,38	25,79	26,5	28,62	28,62	28,62
13.	Kepemudaan dan Olahraga						
13.1	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	60,00	60,00	60,00	60,00	75,00	75,00
13.2	Persentase Pemuda yang Aktif Berorganisasi	2,50	2,50	2,75	2,75	3,00	3,00
13.3	Persentase Pemuda yang Berwirausaha	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
13.4	Rasio Lapangan Olahraga per 1000 Penduduk	0,11	0,12	0,14	0,15	0,17	0,17



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
14.	Statistik						
14.1.	Persentase Ketersediaan Data Informasi Statistik Sektoral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	Persandian						
15.1.	Persentase Berita Sandi Daerah yang diamankan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	Kebudayaan						
16.1.	Persentase Benda dan Situs Cagar Budaya yang dikelola	40,00	60,00	60,00	80,00	100,00	100,00
16.2.	Persentase Kegiatan Seni Budaya yang dilaksanakan	86,00	89,00	93,00	95,00	100,00	100,00
16.3.	Persentase Pengelolaan Situs Bersejarah	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	60,00
17.	Perpustakaan						
17.1.	Persentase Jenis Koleksi Perpustakaan Umum Daerah	68,17	69,67	71,17	72,67	74,17	74,17
17.2.	Persentase Perpustakaan Desa/Kelurahan/Kecamatan yang dikembangkan	17,65	19,44	21,62	23,68	25,64	25,64
18.	Kearsipan						
18.1	Persentase OPD, Kelurahan dan Pemerintahan Desa, BUMN, BUMD, Perguruan tinggi yang Tertib Arsip	66,30	72,57	78,85	85,13	91,40	91,40
18.2	Persentase OPD, Kelurahan, Pemerintahan Desa, Perguruan Tinggi, BUMN dan BUMD yang Dibina/Dilatih	57,14	64,29	71,43	78,57	85,71	85,71



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
C.	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN						
1.	Pariwisata						
1.1.	Destinasi Wisata yang Berkualitas (%)	7,40	24,07	42,59	66,67	100,00	100,00
1.2.	Persentase Usaha Pariwisata yang Memiliki Sertifikasi / Memenuhi Standar Usaha Pariwisata	41,45	45,60	50,16	55,17	60,69	60,69
1.3.	Persentase Pelaku Wisata yang Memiliki Sertifikasi Profesi	5,00	10,00	25,00	35,00	50,00	50,00
2.	Pertanian						
2.1.	Peningkatan Kelompok Tani (%)	2,10	2,44	2,51	2,57	2,62	2,62
2.2.	Persentase Penyuluh Pertanian Berkinerja BAIK (Sesuai kriteria Permentan Nomor 91 Tahun 2013)	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Perdagangan						
3.1.	Persentase Penurunan Pelanggaran Alat UTP	20,00	16,00	14,00	8,00	4,00	4,00
3.2.	Persentase Penurunan Peredaran Barang dan Jasa yang tidak sesuai Standar	10,81	8,11	7,50	5,00	2,50	2,50
3.3.	Persentase tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif	23,53	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
4.	Perindustrian						
4.1.	Persentase Peningkatan IKM yang Berbasis Teknologi	74,74	75,89	76,92	79,47	82,39	82,39
4.2.	Persentase IKM terlatih terhadap Jumlah IKM	14,12	15,46	16,07	16,15	16,56	16,56
5.	Kelautan dan Perikanan						
5.1.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	724,77	768,26	814,36	863,22	915,01	915,01
5.2.	Persentase Nelayan yang Naik Kelas	25,50	28,87	34,43	37,60	40,00	40,00
5.3.	Persentase Pembudidaya Ikan yang Naik Kelas	40,55	44,29	48,34	53,09	56,50	56,50
D	PENUNJANG URUSAN						
1.	Perencanaan Pembangunan						
1.1.	Persentase Program RKPD yang dijabarkan dalam APBD Tiap Tahunnya	75,00	77,00	79,00	80,00	82,00	82,00
1.2.	Persentase Keselarasan RKPD terhadap PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.	Persentase Keselarasan Program RKPD terhadap Program RKP	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
1.4.	Persentase Keselarasan Renstra PD terhadap RPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5.	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang RKPD	67,00	69,00	71,00	73,00	75,00	75,00
1.6.	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan	100	100	100	100	100	100



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
	daerah yang lengkap, akurat dan Tepat Waktu						
2.	Keuangan						
2.1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2.	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan						
3.1.	Persentase Peningkatan Kualitas Aparatur yang Kompeten sesuai Tupoksi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2.	Persentase Aparatur yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	63,50	65,62	66,25	68,75	75,00	75,00
3.3.	Persentase Aparatur yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	13,33	17,14	20,00	22,20	24,44	24,44
4.	Penelitian dan Pengembangan						
4.1.	Persentase Penelitian yang Mendukung Perencanaan yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.	Persentase Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dari Hasil Penelitian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3.	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah yang dikembangkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
5.	Pengawasan						
5.1.	% OPD yang Bebas dari Penyimpangan Keuangan yang Material	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
5.2.	% Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan APIP yang Selesai ditindaklanjuti	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
5.3.	Jumlah Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan BPK yang Selesai ditindaklanjuti	9	8	7	6	5	5
5.4.	% Kasus/Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.5.	% OPD yang Maturitas SPIP Minimal Level 3	64,71	73,53	82,35	91,18	100,00	100,00
6.	Sekretariat Dewan						
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja
6.2.	Tersusun dan Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
6.3.	Terintegrasinya Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Target Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang diformulasikan dalam program dan kegiatan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja, dengan prioritas kegiatan utama program-program beserta indikator kinerja program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Program Utama / Prioritas Daerah yang menjadi strategi umum pembangunan dalam RPD Kabupaten Barito Selatan tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan



3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPD di buat Fokus Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan, untuk masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Tahun 2023 sampai Tahun 2026. Sehingga RKPD Tahun 2023 difokuskan pada **“Pengembangan Ekonomi Daerah melalui optimalisasi sumberdaya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang handal”**.

A. Pencapaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Kabupaten Barito Selatan Dalam Pelaksanaan Program / Kegiatan

Sebagai penyempurnaan daripada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri**



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Intansi Pemerintah.

Dalam rangka menerapkan manajemen kinerja adalah Pengukuran Kinerja Kegiatan yang menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan pencapaian kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Sehingga pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi instansi pemerintah.

Pencapaian program prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 dapat jelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Ekonomi Kreatif serta Mendorong Masuknya Investasi Daerah

Tabel berikut ini menggambarkan capaian sasaran strategis Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Ekonomi Kreatif serta Mendorong Masuknya Investasi Daerah dengan realisasi perbandingan dengan kondisi awal tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Pertumbuhan Sektor Potensial dan Ekonomi Kreatif serta Mendorong Masuknya Investasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Ekonomi Kreatif serta Mendorong Masuknya Investasi Daerah	1. Tingkat Inflasi	Persen	2-4	2-4	2,11
	2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan	Milyar Rupiah	82,8	85,8	95
	3. PDRB Perkapita	Juta	58,82	59,25	100

Sumber data Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Barito Selatan

Capaian kinerja atas pertumbuhan sektor potensial dan ekonomi kreatif serta mendorong masuknya investasi sebagaimana data capaian kinerja yang disampaikan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan.

2. Meningkatkan Konektivitas Wilayah

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Meningkatnya Konektivitas Wilayah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Konektivitas Wilayah	1. Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	34,67	36,60	36,50
	2. Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	48,50	51,25	51,25
	3. Layanan Angkutan Darat dan Sungai	Persen	47	50	29,01

3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 3.3.
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72,64	72,90	71,98

Sumber data Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan



4. Meningkatkan Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Tabel 3.4.
Capaian Kinerja Meningkatkan Fungsi Tata Ruang
Wilayah Kabupaten

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten	Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	20,00	25,00	22,00

Sumber data Dinas PUPR Kab. Barito Selatan

5. Meningkatkan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

Tabel 3.5.
Capaian Kinerja Meningkatkan Ketertiban dan
Ketentraman Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	1. Gangguan Ketertiban Umum yang ditangani	Persen	80	85	100
	2. Penegakan Perda	Persen	80	100	100

6. Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan

Tabel 3.6.
Capaian Kinerja Menurunnya Kemiskinan
di Pedesaan dan Perkotaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	1. Angka Kemiskinan Daerah	Persen	5,04	4,6	4,72
	2. Angka Kemiskinan Ekstrim	Persen	0,19	0,19	0,16
	3. Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6722	0,6722 (Berkembang)	0,7018 (Berkembang)

1. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 turun sebesar 4,72 % dibandingkan pada Tahun 2022 sebesar 4,88 %



2. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Barito Selatan sebesar 0,16%.

Upaya penurunan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Barito Selatan merupakan kerjasama dari semua stakeholder melalui program-program yang berdampak pada menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin dan peningkatan pendapatan serta mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan di daerah Kabupaten Barito Selatan.

3. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan bahwa capaian realisasi Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,7018 masih dalam kategori Berkembang namun mengalami kenaikan dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar 0,6722.

7. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tabel 3.7.
Capaian Kinerja Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang Mandiri	Persen	75,05	80	98



8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat

Tabel 3.8.
Capaian Kinerja Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat	1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum / Air Bersih	Persen	50,35	51,35	77,68
	2. Rasio Rumah Layak Huni	Nilai Rasio	0,19	0,191	0,223
	3. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	Persen	0,30	0,23	0,084
	4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	64,73	65,73	68,00
	5. Persentase Drainase dalam kondisi baik	Persen	34,49	35,17	34,49

9. Meningkatnya Kapasitas Antisipasi dan Penanganan Terhadap Bencana dan Pandemi

Tabel 3.9.
Capaian Kinerja Meningkatnya Kapasitas Antisipasi dan Penanganan Terhadap Bencana dan Pandemi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Kapasitas Antisipasi dan Penanganan Terhadap Bencana dan Pandemi	Indeks Resiko Bencana	Angka	120,40	120,40	111,54

Indeks Resiko Bencana target tahun 2023 angka sebesar 120,40 untuk realisasi sebesar 111,54 atau mengalami penurunan sebesar 8,86 itu menunjukkan bahwa indeks resiko **sedang**.



10. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Tabel 3.10.
Capaian Kinerja Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Persen	90	92	88,4

11. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel

Tabel 3.11.
Capaian Kinerja Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	1. Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	dlm proses
	2. Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK	Indeks	70,23	80,00	76,54
	3. Nilai SAKIP	Kriteria	B	B	B
	4. Nilai LPPD	Kriteria	Sedang	Sedang	dlm proses
	5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Persen	5,75	5,00	dlm proses

1. Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 adalah atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.



2. Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Barito Selatan untuk Tahun 2023 dari target ditetapkan 80% dengan realisasi pencapaian kinerja adalah 76,54%
3. Pencapaian kinerja nilai SAKIP Kabupaten Barito Selatan dari target yang ditetapkan B dengan capaian realisasi Tahun 2023 dengan nilai 60,28 dengan predikat B. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sudah Baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian Unit Kerja Utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kerja.

12. Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat

Tabel 3.12.

Capaian Kinerja Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat	1. Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif (53,36)
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80	80	100

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Indeks Inovasi Daerah pada penilaian IGA Kabupaten Barito Selatan mendapatkan skor nilai 53,36 dengan predikat Inovatif. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023.
2. Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat di Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik rata-rata mencapai 100%



13. Meningkatnya Pengembangan e-Government Menuju Smart City

Tabel 3.13.
Capaian Kinerja Meningkatnya Pengembangan e-Government Menuju Smart City

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Pengembangan e-Government Menuju Smart City	Indeks SPBE	Indeks	2,50	2,60	3,19

Hasil capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pengembangan e-Government menuju smart city dengan indikator kinerja utama indeks SPBE mendapatkan skor nilai 3,19 dengan predikat Baik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2013.

14. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat

Tabel 3.14.
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	32,20	33,36	62,51
	2. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	67,19	67,29	67,75
	3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,95	8,33	9,13

1. Capaian kinerja target Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Barito Selatan yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 33,36 pencapaian kinerja sebesar 62,51. Pencapaian target pengukuran evaluasi dengan kategori Sangat Baik.



2. Indikator kinerja utama Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2023 dengan target 67,29 sebagaimana data yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan melalui Badan Pusat Statistik Barito Selatan dengan capaian kinerjanya terealisasi sebesar 67,75
3. Indikator kinerja utama Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2023 dengan target 8,33 dengan capaian kinerja terealisasi 9,13 sumber data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

B. Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Tema dari RKP Tahun 2023 adalah: ***“Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”***, Pembangunan Nasional diarahkan pada 7 (tujuh) arah kebijakan prioritas, yang meliputi :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
6. Ekonomi hijau; dan
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

Sedangkan untuk Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 adalah:



1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat;
2. Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikasi masyarakat adat untuk Kalteng Elok;
3. Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh-tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius;
4. Mempercepat pengembangan Kawasan Industri, Ekonomi dan Food Estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat;
5. Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah; dan
6. Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni.



Memperhatikan arah dan sasaran pembangunan baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi diatas, maka tema pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 adalah:

“Pengembangan Ekonomi Daerah melalui optimalisasi sumberdaya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang handal”.

Tema Pembangunan diatas, merupakan tema tahun pertama dari RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026. Tema pembangunan tahun pertama ini akan kita maknai sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional di semua aspek, baik yang menyangkut infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban umum, sosial, perumahan dan permukiman, Ketahanan Pangan, pertanian, perikanan, Ekonomi Hijau, penyediaan lapangan kerja, dan UMKM melalui upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal setempat, sembari kita juga akan melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan berdaya saing dengan peningkatan pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Dalam kaitannya dengan kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19, maka Tema pembangunan Tahun 2023, juga memberikan makna bahwa, kita akan fokus untuk menjamin percepatan proses penuntasan proses vaksinasi virus COVID-19 serta pengelolaan dampak pasca proses.



Dalam rangka mendukung peningkatan Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan juga berupaya mendukung Inovasi-Inovasi yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Saat ini ada 2 (dua) Inovasi yang menjadi unggulan, yaitu SIMDATIK (Sistem Informasi Data Statistik) yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika dan SIGERA (Sistem Informasi Geoportal Daerah) yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

C. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran dan Prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023. Hubungan dari masing-masing Prioritas Pembangunan tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah ini :



Tabel 3.15.
Hubungan dan Sinkronisasi Prioritas
Pembangunan Tahun 2023

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PRIORITAS KABUPATEN BARITO SELATAN
Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.	Mempercepat pengembangan Kawasan Industri, Ekonomi dan Food Estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat.	Mendukung pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional di semua aspek, baik yang menyangkut infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban umum, sosial, perumahan dan permukiman, Ketahanan Pangan, pertanian, perikanan, Ekonomi Hijau, penyediaan lapangan kerja, dan UMKM melalui upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal setempat.
Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan <i>decent job</i> .		
Mendorong pemulihan dunia usaha.		
Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan Dalam rangka mendorong produktivitas.		
Ekonomi hijau	Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikasi masyarakat adat untuk Kalteng Elok.	
Percepatan pembangunan infrastruktur dasar.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat.	
Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah; 2. Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh-tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius; 3. Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni. 	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan berdayasaing dengan peningkatan pada bidang pendidikan dan kesehatan



D. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023 terhadap program dan kegiatan prioritas dalam mendukung capaian kinerja Bupati selaku Kepala Daerah sebagaimana yang disampaikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

Tabel 3.16.
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Untuk Tahun Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	1.256.156.101.086,00	1.253.376.410.889,11	99,84	1.129.289.997.519,67	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	88.728.221.649,00	85.925.648.802,11	97,99	80.625.168.698,42	
4.1.01	Pajak Daerah	22.430.600.000,00	18.091.398.991,87	80,65	13.225.974.289,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	7.868.448.665,00	7.731.937.413,00	87,73	6.302.465.018,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.209.260.800,00	81.147.428,96	0,79	12.460.909.382,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	48.219.912.184,00	60.021.164.968,28	129,83	48.635.819.999,42	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.153.986.065.315,00	1.167.280.762.087,00	101,39	1.045.252.098.794,25	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.113.000.382.000,00	1.107.750.682.406,00	99,75	1.000.169.797.711,00	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.039.478.879.000,00	1.032.745.717.556,00	99,34	927.210.037.471,00	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0	1.829.618.000,00	
4.2.01.05	Dana Desa	73.521.503.000,00	75.004.964.850,00	105,84	71.130.142.240,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.985.683.315,00	59.530.079.681,00	145,85	45.082.301.083,25	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	40.815.683.315,00	59.530.079.681,00	145,85	44.932.301.083,25	
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	170.000.000,00	0,00	0	150.000.000,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.441.814.122,00	170.000.000,00	1,03	3.412.730.027,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.441.814.122,00	170.000.000,00	1,03	3.412.730.027,00	
5	BELANJA DAERAH	1.356.932.222.948,00	1.232.419.857.227,32	90,79	1.021.263.414.496,14	
5.1	BELANJA OPERASI	873.595.175.293,00	788.731.119.192,23	90,23	689.300.293.535,03	
5.1.01	Belanja Pegawai	453.703.363.740,00	406.876.459.608,38	89,68	390.856.704.438,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.348.103.177,00	301.518.375.343,85	89,91	252.906.962.620,03	
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0	922.040.472,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	3.183.742.010,00	3.183.629.010,00	100,00	926.898.010,00	
5.1.05	Belanja Hibah	75.325.066.366,00	72.581.162.230,00	96,36	40.223.572.495,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.034.900.000,00	4.571.493.000,00	70,06	3.464.115.500,00	
5.2	BELANJA MODAL	308.617.483.667,00	278.112.554.048,09	90,11	179.379.443.149,11	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.251.967.648,00	50.074.252.410,59	84,51	29.493.655.372,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.840.527.516,00	76.680.345.009,00	94,66	61.637.542.649,11	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	168.324.988.503,00	151.160.376.628,50	89,89	88.206.715.128,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	197.500.000,00	98,79	41.530.000,00	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.195.172.969,00	7.372.336.537,00	72,31	12.903.628.788,00	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.195.172.969,00	7.372.336.537,00	72,31	12.903.628.788,00	
5.4	BELANJA TRANSFER	164.524.391.019,00	158.203.847.450,00	96,16	139.680.049.024,00	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.285.283.419,00	0,00	0,00	1.700.837.864,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	160.239.107.600,00	158.203.847.450,00	98,73	137.979.211.160,00	
	SURPLUS/DEFISIT	100.776.121.862,00	20.956.553.661,79	-20,80	108.026.583.023,53	

6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		117.276.121.862,00	117.276.121.862,00	100	71.549.538.838,87
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		117.276.121.862,00	117.276.121.862,00	100	71.549.538.838,87
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		16.500.000.000,00	16.250.000.000,00	98,48	62.300.000.000,00
6.2.02	Penyerahan Modal Daerah		16.350.000.000,00	16.250.000.000,00	99,39	12.300.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		150.000.000,00	0	0	50.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO		100.776.121.862,00	101.026.121.862,00	-16,12	9.249.538.838,87
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		-	121.982.675.523,79	0	117.276.121.862,40

Printed By SIMDA:NG





BAB IV PENUTUP

Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan serta dalam rangka mewujudkan good governance. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan yang disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat **keberhasilan dan kegagalan** pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang diprioritaskan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 -2026

Berbagai keberhasilan yang dicapai sebagaimana visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada rentang tahun 2023-2026 patut disyukuri, mengingat bahwa pencapaiannya diraih dengan cara yang tidak mudah, jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan berupaya seoptimal mungkin untuk mengakomodasi berbagai keinginan dan kepentingan semua lapisan masyarakat sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan melalui



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

pendayagunaan sumber daya yang relatif terbatas. Sangat disadari, disamping beberapa keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang segera diatasi dan dibenahi.

Selaras dengan komitmen yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 yang bertujuan untuk pencapaian indikator kinerja sebagaimana arah kebijakan yang telah ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Ditetapkan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Barito Selatan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan seperti dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 s.d. 2023

No	Tahun	Nilai	Predikat
1.	2017	47,06	C
2.	2018	56,90	CC
3.	2019	57,46	CC
4.	2020	59,04	CC
5.	2021	57,19	CC
6.	2022	56,47	CC
7.	2023	60,28	B



Namun hasil penilaian tersebut masih memerlukan perbaikan lebih lanjut karena tingkat efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh kualitas pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Upaya perbaikan kedepan tetap terus dilakukan agar laporan LaKIP menyajikan informasi-informasi yang selaras dengan tujuan/sasaran yang tertuang di dalam Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada sasaran dan indikator kinerja pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Tindak lanjut Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor tentang Pembentukan Tim Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Barito Selatan. Maka Tim Peningkatan SAKIP Kabupaten Barito Selatan melakukan hal sebagai berikut:

- a. Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan upaya perbaikan penerapan SAKIP di Kabupaten Barito Selatan sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan fokus pada hal-hal yang strategis.
- b. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten dan Biro Organisasi dalam hal kegiatan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

evaluasi AKIP untuk menindaklanjuti rekomendasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

- c. Perbaikan-perbaikan terhadap beberapa sasaran yang tidak berhasil mencapai target yang sudah ditentukan dalam sasaran indikator kinerja dalam RPD Kabupaten Barito Selatan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Inspektorat dalam rangka mewujudkan semangat tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan memberikan rekomendasi serta catatan-catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan kebijakan pembangunan strategis dalam rangka mencapai pembangunan masyarakat Barito Selatan yang ***Dahani Dahana Tuntung Tulus (Menuju Masyarakat Adil dan Makmur Sampai Selama-lamanya.***



BUPATI BARITO SELATAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. H. DEDDY WINARWAN, S.STP., M.Si**

Jabatan : Pj. BUPATI BARITO SELATAN

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Buntok, 29 Agustus 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

Dr. H. DEDDY WINARWAN, S.STP., M.Si



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan ekonomi kreatif serta mendorong masuknya investasi daerah.	1. Tingkat Inflasi. 2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan. 3. PDRB per Kapita.	Persen Milyar Rupiah Juta	2-4 85,8 59,25
2.	Meningkatnya konektivitas wilayah.	1. Persentase jalan dalam kondisi mantap. 2. Persentase jembatan dalam kondisi baik. 3. Persentase layanan angkutan darat dan sungai.	Persen Persen Persen	36,60 51,25 50
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan (IKL).	Indeks	72,90
4.	Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten.	Ketaatan terhadap RTRW.	Persen	25
5.	Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat.	1. Persentase gangguan ketertiban umum yang ditangani 2. Persentase Penegakan PERDA	Persen Persen	85 100
6.	Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan.	1. Angka Kemiskinan Daerah 2. Angka Kemiskinan Ekstrim 3. Indeks Desa Membangun	Persen Persen Indeks	4,6 0,19 0,6722 (Berkembang)
7.	Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Persentase PMKS yang Mandiri.	Persen	80
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dasar permukiman masyarakat.	1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum / Air Bersih. 2. Rasio Rumah Layak Huni. 3. Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani. 4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi. 5. Persentase Drainase dalam kondisi baik.	Persen Nilai Rasio Persen Persen Persen	51,35 01,19 1,25 65,73 35,17

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4	5
9.	Meningkatnya kapasitas antisipasi dan penanganan terhadap bencana dan pandemi.	Indeks Resiko Bencana.	Angka	120,40
10.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.	Persen	92
11.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.	1. Opini BPK. 2. Indeks Pencegahan Korupsi/ Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 3. Nilai SAKIP. 4. Nilai LPPD. 5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.	Predikat Indeks Kriteria Kriteria Persen	WTP 80,00 B Sedang 5,00
12.	Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.	1. Indek Inovasi Daerah pada penilaian IGA. 2. Indeks Kepuasan Masyarakat.	Predikat Persen	Inovatif 80
13.	Meningkatnya Pengembangan e-government menuju smart city.	Indeks SPBE.	Indeks	2,60
14.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat.	1. Indeks pembangunan keluarga (ibangga). 2. Angka Harapan Hidup (AHH) 3. Rata - rata lama sekolah (RLS)	Indeks Tahun Tahun	33,36 67,29 8,33
15.	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks/Persen	91,80
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.	Persen	23,53

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023-2026**

No.	Bidang Urusan	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	45.985.762.990,00
		1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum	40.000.000,00
		1.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	90.000.000,00
		1.01.05 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	55.733.000,00
		1.01.06 Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	119.999.850,00
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	49.831.355.035,00
		1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.315.319.977,00
		1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	310.103.800,00
		1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	472.240.000,00
3.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	16.218.108.000,00
		1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.355.346.100,00
		1.03.04 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.514.000.000,00
		1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.985.646.014,00
		1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	2.100.000.000,00
		1.03.07 Program Pengembangan Permukiman	8.750.230.000,00
		1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	18.351.670.000,00
		1.03.09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	24.544.000.000,00
		1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	122.900.661.000,00
		1.03.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.114.200.000,00
		1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.440.000.000,00
		4.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 Program Kawasan Permukiman	277.033.600,00		
1.04.04 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	101.200.000,00		
1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	4.505.451.450,00		

No.	Bidang Urusan	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
5.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.803.459.200,00
		1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	958.156.710,00
		1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.243.072.200,00
6.	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	130.000.000,00
		1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	697.300.000,00
		1.06.05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	284.000.000,00
		1.06.06 Program Penanganan Bencana	133.000.000,00
		1.06.07 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	70.200.000,00
7.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	2.07.02 Program Perencanaan Tenaga Kerja	20.000.000,00
		2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	80.000.000,00
		2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja	247.760.000,00
		2.07.05 Program Hubungan Industrial	190.010.000,00
8.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	41.515.000,00
		2.08.03 Program Perlindungan Perempuan	24.688.400,00
		2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	123.426.000,00
		2.08.05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	19.624.200,00
		2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	21.117.800,00
		2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak	94.050.000,00
9.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2.09.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	69.000.000,00
		2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	412.000.000,00
		2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan	184.200.680,00
		2.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan	25.000.000,00
10.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	2.10.02 Program Pengelolaan Izin Lokasi	14.670.000,00
		2.10.04 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	60.914.480,00
		2.10.06 Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	76.999.880,00
		2.10.09 Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	75.284.880,00
		2.10.10 Program Penatagunaan Tanah	7.000.000,00

No.	Bidang Urusan	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
11.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	400.000.000,00
		2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	804.320.000,00
		2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	80.000.000,00
		2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	50.000.000,00
		2.11.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	120.000.000,00
		2.11.07 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	50.000.000,00
		2.11.08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	85.000.000,00
		2.11.09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	25.000.000,00
		2.11.10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	60.000.000,00
		2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	5.174.872.464,00
12.	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk	233.436.500,00
		2.12.03 Program Pencatatan Sipil	298.159.960,00
		2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	167.257.460,00
		2.12.05 Program Pengelolaan Profil Kependudukan	46.244.340,00
13.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.13.02 Program Penataan Desa	898.102.488,00
		2.13.03 Program Peningkatan Kerja Sama Desa	25.000.000,00
		2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa	87.823.779.600,00
		2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.020.000.000,00
14.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.14.02 Program Pengendalian Penduduk	197.423.400,00
		2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	1.185.057.420,00
		2.14.04 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1.551.440.000,00
15.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	1.670.000.000,00
		2.15.03 Program Pengelolaan Pelayaran	4.506.339.225,00

No.	Bidang Urusan	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
16.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.511.999.950,00
		2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	554.999.732,00
17.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	2.17.03 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	47.829.780,00
		2.17.04 Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	10.016.800,00
		2.17.05 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	104.687.200,00
		2.17.06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	67.999.880,00
		2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	300.112.510,00
		2.17.08 Program Pengembangan Umkm	535.000.000,00
18.	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	442.000.000,00
		2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal	94.000.000,00
		2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	584.000.000,00
		2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	687.600.000,00
19.	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.672.556.360,00
		2.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.293.386.800,00
20.	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	159.999.764,00
21.	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	2.21.02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	25.000.000,00
22.	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan	452.439.000,00
		2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	60.475.000,00
		2.22.05 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	46.776.000,00
		2.22.06 Program Pengelolaan Permuseuman	29.988.080,00
23.	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan	204.886.500,00
24.	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	2.24.02 Program Pengelolaan Arsip	71.896.600,00

No.	Bidang Urusan	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
25.	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	203.300.000,00
		3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	561.600.000,00
		3.25.05 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	100.000.000,00
		3.25.06 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	110.000.000,00
26.	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	91.093.382,00
		3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata	179.144.000,00
		3.26.04 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	25.000.000,00
		3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	28.054.300,00
27.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.583.183.400,00
		3.27.03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	150.000.000,00
		3.27.04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	250.575.000,00
		3.27.05 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	20.000.000,00
		3.27.06 Program Perizinan Usaha Pertanian	30.000.000,00
		3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian	1.906.100.600,00
28.	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	3.30.02 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	33.000.000,00
		3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	525.243.200,00
		3.30.04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	574.319.250,00
		3.30.06 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	224.366.690,00
29.	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	104.000.000,00
		3.31.04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	717.087.500,00
30.	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	3.32.02 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	30.000.000,00
		3.32.03 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	30.000.000,00
		3.32.04 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	77.880.000,00
31.	Sekretariat Daerah	4.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	21.216.331.950,00
		4.01.03 Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.156.126.410,00

No.	Bidang Urusan	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
32.	Sekretariat DPRD	4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	13.323.657.000,00
33.	Perencanaan	5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	794.767.000,00
		5.01.03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.755.800.000,00
34.	Keuangan	5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	103.804.896.608,00
		5.02.03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.754.126.770,00
		5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.925.970.413,00
35.	Kepegawaian	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	2.798.800.000,00
36.	Penelitian Dan Pengembangan	5.05.02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	215.000.000,00
37.	Inspektorat Daerah	6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.601.328.250,00
		6.01.03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	193.865.000,00
38.	Kecamatan	7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	290.381.500,00
		7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.396.831.500,00
		7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	106.088.000,00
		7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	799.509.000,00
		7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	253.245.900,00
39.	Kesatuan Bangsa Dan Politik	8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	9.128.233.733,00
		8.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.842.347.000,00
		8.01.04 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	10.337.317.900,00
		8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.849.173.740,00
TOTAL PAGU			642.104.838.055,00

Buntok,, 29 Agustus 2023



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

Dr. H. DEDDY WINARWAN, S.STP., M.Si



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Pelita Raya Nomor 60 Buntok Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah
Telepon (0525) 21262 Faksimile (0525) 22357

Email : inspektoratbarsel@yahoo.co.id Website: inspektorat.barselkab.go.id

LAPORAN HASIL REVIU (LHR)

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LaKIP)
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2023**

OLEH :

**TIM REVIU INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR : 700/ 07 /LHR / INSP/2024
TANGGAL : 27 MARET 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Pelita Raya Nomor 60 Buntok Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah
Telepon (0525) 21262 Faksimile (0525) 22357

Email : inspektoratbarsel@yahoo.co.id / inspektoratdaerah.barsel@gmail.com

Website : inspektorat.baritoselatan.go.id

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Buntok, Maret 2024

Plt. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

YURISTIANTI YUDYA, S.Hut.,M.M,CGCAE
Pembina
NIP. 19731220 200801 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Pelita Raya Nomor 60 Buntok Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah

Telepon (0525) 21262 Faksimile (0525) 22357

Email : inspektoratbarsel@yahoo.co.id / inspektoratdaerah.barsel@gmail.com

Website : inspektorat.baritoselatan.go.id

Buntok, 27 Maret 2024

Nomor : 700/07/ LHR/ INSP/2024.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Barito Selatan untuk
Tahun Anggaran 2024.

Kepada
Yth. Pj. Bupati Barito Selatan
di –

Buntok

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Surat Edaran MenPANRB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
- d. Surat Tugas Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 700.094 / 73 / INSP / 2024 tanggal 20 Maret 2024.

3. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan mulai tanggal 21 s/d 30 Maret 2024.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- a. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Sedangkan sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap Draft format laporan LaKIP, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.

6. Simpulan dan Rekomendasi

6.1. Simpulan

6.1.1. Format

Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja Pemerintah (Laporan Kinerja/LKj) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 6.1.1.1. *Draft* Laporan LaKIP telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
- 6.1.1.2. *Draft* Laporan LaKIP telah menyajikan informasi target kinerja
- 6.1.1.3. *Draft* Laporan LaKIP telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang memadai
- 6.1.1.4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada laporan
- 6.1.1.5. Telah menyajikan Penyebab dan upaya perbaikan ke depan
- 6.1.1.6. Telah menyajikan akuntabilitas Kinerja

6.1.2. Mekanisme Penyusunan

Kesimpulan terhadap mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 6.1.2.1. *Draft* Laporan LaKIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu
- 6.1.2.2. Informasi yang disampaikan dalam *Draft* Laporan LaKIP telah didukung dengan data yang memadai
- 6.1.2.3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun *Draft* Laporan LaKIP
- 6.1.2.4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja
- 6.1.2.5. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja
- 6.1.2.6. Analisis/penjelasan dalam *draft* Laporan LaKIP telah diketahui oleh unit kerja terkait
- 6.1.2.7. *draft* Laporan LaKIP bukan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya

6.1.3. Substansi

Kesimpulan terhadap Substansi laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 6.1.3.1. Tujuan/sasaran dalam *draft* Laporan LaKIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja
- 6.1.3.2. Tujuan/sasaran dalam *draft* Laporan LaKIP telah selaras dengan rencana strategis
- 6.1.3.3. Perbaikan final dokumen *draft* Laporan LaKIP mengacu pada CHR Reviu LaKIP
- 6.1.3.4. Target Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran dalam *draft* Laporan LaKIP telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.
- 6.1.3.5. IKU pada *draft* Laporan LaKIP telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan
- 6.1.3.6. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat
- 6.1.3.7. IKU telah cukup mengukur tujuan/sasaran
- 6.1.3.8. IKU telah SMART

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami rekomendasikan kepada Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan :

1. Dalam hal format laporan kinerja, agar:
 - a) Laporan kinerja menyajikan target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan.
 - b) Laporan kinerja dilampiri dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.

- c) Target Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran dalam LKj diberi satuan (mis: %, unit, orang, dll) dan OPD harus memberi Target
2. Dalam hal mekanisme penyusunan Laporan kinerja agar ditampilkan sumber pengambilan datanya.
 3. Dalam hal Subtansi, agar:
 - a) Tujuan/sasaran dalam LaKIP disesuaikan dengan tujuan/sasaran yang tercantum dalam perjanjian kinerja.
 - b) Tujuan/sasaran dalam LaKIP diselaraskan dengan tujuan/sasaran yang tercantum dalam rencana strategis.
 - c) Tujuan/sasaran dalam LaKIP disesuaikan dengan tujuan/sasaran yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.
 - d) Data kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan data kinerja dengan tahun lalu (KKR-1).
 - e) IKU dibuat SMART.

Demikian laporan hasil reuiu ini kami sampaikan sebagai bahan lebih lanjut.


INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
YURISTIANTI YUDYA, S.Hut.,M.M,CGCAE
Pembina
NIP. 19731220 200801 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN



**IMPLEMENTASI SAKIP
PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN
TAHUN 2023**

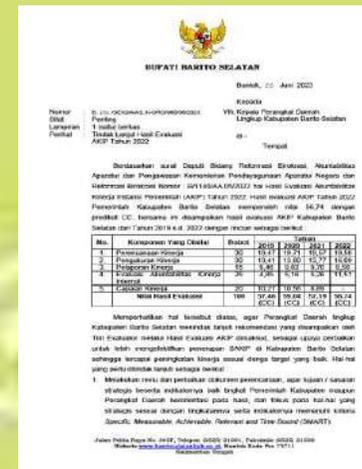
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 menunjukkan nilai 56,74 dengan predikat CC. Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor : B/1140/AA.05/ 2022 tanggal 6 Desember 2022 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022



Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi LHE AKIP Tahun sebelumnya :

1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 134/SEKDA/AS.III-ORG/060/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal Desk Pemenuhan Dokumen Pra Evaluasi SAKIP Tahun 2023 bersama Tim Evaluator Kementerian PANRB

2. Surat Pj. Bupati Barito Selatan Nomor : 181/SEKDA/AS.III-ORG/060/06/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022



3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 141/SEKDA/ AS.III-ORG/060/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 perihal Desk Pra Evaluasi SAKIP Tahun 2023



4. Mengikuti Asistensi Reformasi Birokrasi dan SAKIP di Jakarta



5. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 197.1/SEKDA/AS.III-ORG/060/07/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Data Dukung dan Matrik Tindak Lanjut AKIP Tahun 2022



MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022

No	Rekomendasi	Respones Akut / Tindak Lanjut	Peningkatan Kinerja	Metrik / Indikator / Pengukuran	Link
1	Membuat menu dan perbaikan dokumen perencanaan, agar tahun kedepan perencanaan Kabupaten maupun Kecamatan dan Kelurahan pada level dan pada level yang terintegrasi dengan Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Kelurahan.	Mengikuti kegiatan Pembinaan Kabupaten Barito Selatan tahun 2023 untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa/kelurahan yang terintegrasi dengan Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Kelurahan.	Reputasi	Diukur dengan Perataan Bulan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2028 (selesai)	https://www.baritoselatan.go.id
2	Mengikuti kegiatan Pembinaan Kabupaten Barito Selatan tahun 2023 untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa/kelurahan yang terintegrasi dengan Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Kelurahan.	Membuat menu dan perbaikan dokumen perencanaan, agar tahun kedepan perencanaan Kabupaten maupun Kecamatan dan Kelurahan pada level dan pada level yang terintegrasi dengan Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Kelurahan.	Selisi (Rapor Organisasi)	Desk: Buletin Nomor 10/2019/SEKDA/AS-III-ORG/060/07/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 (selesai)	
3	Membuat dokumen Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja dan Evaluasi Monev/evaluasi kinerja instansi.	Membuat dokumen Teknis Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja dan Evaluasi Monev/evaluasi kinerja instansi.	Selisi (Rapor Organisasi)	Desk: Buletin Nomor 10/2019/SEKDA/AS-III-ORG/060/07/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 (selesai)	
4	Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi lain yang ada di Kabupaten Barito Selatan.	Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi lain yang ada di Kabupaten Barito Selatan.	Selisi (Rapor Organisasi)	Indikator: Kinerja Perencanaan dan PD tahun 2022 (selesai)	
5	Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi lain yang ada di Kabupaten Barito Selatan.	Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi lain yang ada di Kabupaten Barito Selatan.	Selisi (Rapor Organisasi)	Indikator: Kinerja Perencanaan dan PD tahun 2022 (selesai)	
6	Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi lain yang ada di Kabupaten Barito Selatan.	Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi lain yang ada di Kabupaten Barito Selatan.	Selisi (Rapor Organisasi)	Indikator: Kinerja Perencanaan dan PD tahun 2022 (selesai)	

Semua Data Dukung dan Matrik Tindak Lanjut sudah disampaikan melalui e-SAKIP Reviu (esr) Kementerian PANRB

6. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
 Nomor : 236/SEKDA/ AS.III-ORG/060/08/2023
 tanggal 4 Agustus 2023 perihal Rapat Kerja



7. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
 Nomor : 181/SEKDA/AS.III-ORG/060/08/2023
 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Rapat Evaluasi
 Perjanjian Kinerja OPD



Perencanaan Kinerja Kab. Barito Selatan

RPJMD Periode
2017-2022
Sdh Berakhir



RPD
Periode
2023-2026



Perjanjian Kinerja
Berdasarkan Hasil Asistensi
dg Tim Menpan RB



SK IKU
Kab. Barsel

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ /2023
TANGGAL : Agustus 2023
TERTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BUPATI BARITO SELATAN.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan inovasi kreatif serta mendorong masyarakat investasi daerah.	1. Tingkat Indeks	Tingkat Indeks diukur dengan IHI (Indeks Harga Konsumen). Penapisan Tingkat Indeks Kab. Barito Selatan Melalui Simulasi Indeks Kota Palangka Raya, karena Palangka Raya merupakan kota DED (Indeks Harga Konsumen terendah di antara Kabupaten Barito Selatan). Pada Kabupaten Barito Selatan merupakan kota IPI (Indeks Perdagangan Ekspor) dan merupakan salah satu aplikasi SP2K2 (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Publik) yang setiap hari diupdate perubahan harga 20 komoditas makanan pokok 15.000 jenis dan kerja melalui Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah.	1. BPS 2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah	1. BPTA 2. DISDAGKOP UEM 3. DKPPP
		2. PERB atau dasar harga barang	PERB atau dasar harga barang menggunakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, dengan PERB atau dasar harga konstan menggunakan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Tahun dasar tersebut umumnya ditentukan selama periode 10 (sepuluh) tahunan. Penetapan PERB atau dasar konstan, umumnya diberikan untuk mempertahankan struktur indeks/deflasi akibat inflasi harga barang.	BPS	1. DISDAGKOP UEM 2. DKPPP

Evaluasi Internal sudah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor : 700/32/LHE/INSP/2023 tanggal 19 Juni 2023

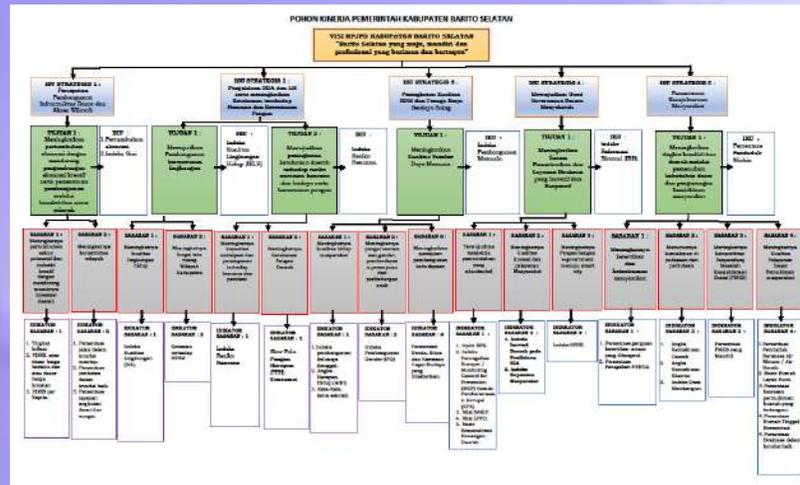
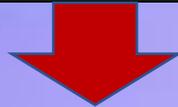


LEMBAR KERJA (LHE)
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

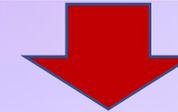
No	UFD	Pembacaan Laporan (LHE)					Tingkat
		Pembacaan Laporan (LHE)	Pengalaman Kerja (LHE)	Pengalaman Kerja (LHE)	Keahlian Kerja (LHE)	Keahlian Kerja (LHE)	
1	Bendaharawan	44,00	55,00	55,00	55,00	55,00	4
2	Staf Umum	21,00	44,00	44,00	44,00	44,00	3
3	Keuangan	44,00	55,00	55,00	55,00	55,00	4
4	Kelembagaan dan Organisasi	44,00	55,00	55,00	55,00	55,00	4
5	Kelembagaan dan Organisasi	44,00	55,00	55,00	55,00	55,00	4
6	Kelembagaan dan Organisasi	44,00	55,00	55,00	55,00	55,00	4
7	Kelembagaan dan Organisasi	44,00	55,00	55,00	55,00	55,00	4
8	Kelembagaan dan Organisasi	44,00	55,00	55,00	55,00	55,00	4
9	Kelembagaan dan Organisasi	44,00	55,00	55,00	55,00	55,00	4
10	Kelembagaan dan Organisasi	44,00	55,00	55,00	55,00	55,00	4
11	Kelembagaan dan Organisasi	44,00	55,00	55,00	55,00	55,00	4
12	Kelembagaan dan Organisasi	44,00	55,00	55,00	55,00	55,00	4
13	Kelembagaan dan Organisasi	44,00	55,00	55,00	55,00	55,00	4
14	Kelembagaan dan Organisasi	44,00	55,00	55,00	55,00	55,00	4
15	Kelembagaan dan Organisasi	44,00	55,00	55,00	55,00	55,00	4
16	Kelembagaan dan Organisasi	44,00	55,00	55,00	55,00	55,00	4
17	Kelembagaan dan Organisasi	44,00	55,00	55,00	55,00	55,00	4
18	Kelembagaan dan Organisasi	44,00	55,00	55,00	55,00	55,00	4
19	Kelembagaan dan Organisasi	44,00	55,00	55,00	55,00	55,00	4
20	Kelembagaan dan Organisasi	44,00	55,00	55,00	55,00	55,00	4
21	Kelembagaan dan Organisasi	44,00	55,00	55,00	55,00	55,00	4
22	Kelembagaan dan Organisasi	44,00	55,00	55,00	55,00	55,00	4

Logical Framework (Pohon Kinerja) Cascading, Crosscutting

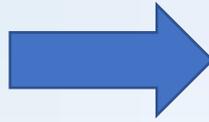
**Pohon Kinerja
Sesuai dengan PK & SK IKU
Pj. Bupati Barito Selatan**



**Cascading dan Komponen Perencanaan
Sesuai dengan PK & SK IKU
Pj. Bupati Barito Selatan**



**Evaluasi Lapangan
Implementasi SAKIP Tahun
2023 dengan Tema
“Pengentasan Kemiskinan”**



**Unit Kerja Yang Terkait dengan
Pengentasan Kemiskinan sesuai dengan
logical framework/ Kerangka Kerja Logis
pengentasan kemiskinan yang dimiliki 13
Urusan dengan 13 OPD yang
menanganinya**



1. Urusan Perencanaan (BAPPEDA)
2. Urusan Kesehatan (Dinkes)
3. Urusan Pendidikan (Diknas)
4. Urusan Ketahanan Pangan (DKPPP)
5. Urusan Sosial (DinSosPMDes, BPBD)
6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DinSosPMDes)
7. Urusan Kependudukan Sipil (DisDukCatpil)
8. Urusan Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
9. Urusan Koperasi, UKM (DisDagKopUKM)
10. Urusan Pekerjaan Umum (Dinas PUPR)
11. Urusan Tenaga Kerja (Disnakertrans)
12. Urusan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (DPPKBP3A)
13. Urusan Perumahan & Kawasan Pemukiman (DISPERKIMTAN)

Terima Kasih





**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LaKIP)
KABUPATEN BARITO SELATAN**



TAHUN 2023